

**POLA KADERISASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DI TINGKAT
LOKAL**

(Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2024)

SKRIPSI

Program sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Aisya Dhefi Helmalia Putri

2106016022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

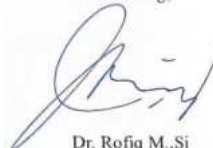
Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Aisyah Dhefi Helmalia Putri
NIM : 2106016022
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pola Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Kudus Tahun 2019-2024)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2025
Pembimbing,

Dr. Rofiq M. Si
NIP. 197303052023211007

PENGESAHAN

PENGESAHAN

SKRIPSI

POLA KADERISASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DI TINGKAT
LOKAL (STUDI KASUS PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019
– 2024)

Disusun oleh :

Aisya Dhefi Helmalia Putri

2106016022

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

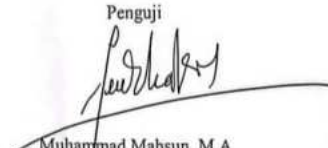
Pada tanggal 18 Maret 2025 dan dinyatakan lulus

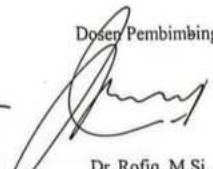
Susunan Dewan Penguji


Ketua
Dr. Rofiq, M.Si.
NIP. 197303052023211007

Sekretaris

M. Nuqlir Bariklana, M. Si
NIP. 198505022190310

Penguji

Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 19851118201601190

Dosen Pembimbing

Dr. Rofiq, M.Si.
NIP. 197303052023211007

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini adalah murni hasil pekerjaan saya sendiri dan tidak memuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun. Seluruh sumber pengetahuan yang digunakan, baik yang sudah diterbitkan maupun belum, telah dikutip dengan baik dalam isi tulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 25 Februari 2025



Aisya Dhefi Helmalia Putri

2106016022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Wa Syukurilah, Asyhadu Allailahailallah Wa Asyhaduanna Muhammadarrasulullah, Allahumma Sholiala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad.

Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pola Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik di Tingkat Lokal (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Kudus Tahun 2019 – 2024). Bahwa yang kita ketahui skripsi merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana strata-1 di UIN Walisongo Semarang yang berbentuk karya ilmiah.

Sebagai mahasiswa yang telah menjalani masa studi selama 4 tahun di jurusan Ilmu Politik, penulis menyadari masih memiliki berbagai keterbatasan dalam hal pengetahuan akademis. Hal ini menyebabkan skripsi yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan wawasan baru dalam memahami pola kaderisasi partai politik di tingkat lokal, terutama dalam konteks Partai Demokrat.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bantuan, pengarahan, bimbingan, maupun doa. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Himawan Rizka Firmanto dan pintu surgaku Ibu Dewi Puji Astuti. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan dan mengusahakan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan secara materi maupun non

materi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu;

3. Cinta kasih kedua saudara kandung saya Aditya Rifkiawan dan Aprissa Tania Dewi atas segala do'a, usaha, dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi;
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang;
5. Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan FISIP, Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Moh Khasan, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Dr. Moch Parmudi, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, dan Dr. Nur Abadi, M.Ag selaku Kabag TU FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada semua mahasiswa untuk kelancaran studi;
6. M. Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik;
7. Dr. Rofiq, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag selaku dosen wali yang tiada hentinya memberikan masukan dan motivasi untuk penyusunan usulan penelitian hingga skripsi;
9. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendidik dan mengajarkan penulis tentang berbagai ilmu pengetahuan baru sampai penulis menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik;
10. Seluruh staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang banyak membantu dalam proses keadministrasian selama penulis menjadi mahasiswa;
11. Anggota DPC Partai Demokrat dan Srikandi Partai Demokrat yang dimintai data dan pengetahuan oleh penulis. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis;
12. Teman-teman penulis yang tak kalah penting kehadirannya, Michelle Angelique F.S, Triestya Carmelita, Khanan Saputra, dan Ahmad Baihaqi. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang sampai saat ini telah berkontribusi dari awal hingga akhir penulisan, memberikan semangat, mendukung,

menghibur, hingga menjadi pendengar yang baik untuk penulis dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.

13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Aisyah Dhefi Helmalia Putri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih untuk berjuang dan mengapresiasi diri sendiri sampai ke tahap ini, meskipun sering dilanda rasa putus asa ketika usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil. Terima kasih telah menjadi pribadi yang pantang menyerah dan selalu siap mencoba hal baru. Terima kasih karena tetap bertahan menghadapi segala kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya dengan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Mari terus merayakan dan mensyukuri setiap kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri.

Setiap pencapaian yang telah penulis raih merupakan hasil dari benih-benih kebaikan yang telah ditanamkan oleh mereka semua. Penulis percaya bahwa kebaikan mereka akan mendatangkan keberkahan di masa mendatang. Penulis menyadari masih banyak pihak yang berkontribusi namun belum tercantum dalam ucapan terima kasih ini, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak yang telah disebutkan atas segala kekhilafan yang mungkin pernah penulis lakukan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* saya persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua saya Bapak Himawan Rizka Firmanto dan Ibu Dewi Puji Astuti. Dua orang yang saya cintai dan sayangi yang sangat berjasa dalam hidup saya hingga detik ini, dua orang yang selalu mengusahakan anak perempuannya ini untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua tidak merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya kehidupan dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih untuk semua do'a dan dukungan ibu dan bapak saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu, Pak, Mah, tolong hidup lebih lama lagi.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah : 216)

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

“Dengan kerja keras dan tekad, seseorang bisa menjadi apa saja dan melakukan apapun yang diinginkan”

(The Script)

ABSTRAK

Sejarah partisipasi perempuan dalam politik memiliki banyak tantangan, di mana stereotip gender dan sistem patriarki sering kali menghalangi peran aktif perempuan. Meskipun terdapat kebijakan seperti UU No. 7 Tahun 1984 dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, namun tantangan struktural dan kultural masih menjadi penghalang utama dalam kaderisasi partai politik di tingkat lokal. Maka fokus penelitian ini adalah mengetahui pola kaderisasi perempuan yang berjalan di Partai Demokrat Kudus dan representasi kader perempuan dalam struktural partai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis melalui tiga tahap utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kaderisasi perempuan di Partai Demokrat Kabupaten Kudus berjalan melalui jalur informal dengan tahapan rekrutmen terbuka dan pelatihan politik, namun belum mampu menghasilkan kader perempuan yang siap menduduki posisi strategis. Upaya ini terkendala oleh terbatasnya sumber daya, rendahnya minat politik perempuan akibat norma sosial-budaya, serta dominasi nilai patriarki yang masih kuat. Sedangkan representasi perempuan di Partai Demokrat masih menghadapi tantangan mendasar akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan kader perempuan berkualitas dan kebutuhan partai untuk mengisi posisi strategis. Walaupun kebijakan kuota 30% telah diterapkan sebagai bentuk afirmasi, implementasinya belum efektif karena proses kaderisasi yang tidak berbasis meritokrasi dan budaya organisasi yang masih didominasi nilai-nilai maskulin. Akibatnya, perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi simbolik tanpa peran strategis, dan berbagai hambatan struktural serta kultural turut memperkuat minimnya pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan partai.

Kata Kunci : Kaderisasi Perempuan, Partai Politik, Representasi Perempuan

ABSTRACT

The history of women's participation in politics has many challenges, where gender stereotypes and patriarchal systems often hinder women's active role. Although there are policies such as Law No. 7 of 1984 and Presidential Instruction No. 9 of 2000 that support women's involvement in politics, structural and cultural challenges are still a major barrier to the regeneration of political parties at the local level. So the focus of this research is to find out the pattern of women's cadre regeneration that runs in the Kudus Democratic Party and the representation of female cadres in the party structure. This research is a qualitative research with a case study approach. Data collection in this study used interview techniques, observation, and documentation. Meanwhile, the data analysis used in this study uses analysis through three main stages, namely, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the pattern of regeneration of women in the Democratic Party of Kudus Regency runs through informal channels with open recruitment stages and political training, but has not been able to produce female cadres who are ready to occupy strategic positions. This effort is constrained by limited resources, low interest in women's politics due to socio-cultural norms, and the dominance of patriarchal values that are still strong. Meanwhile, women's representation in the Democratic Party still faces fundamental challenges due to the imbalance between the availability of qualified female cadres and the party's need to fill strategic positions. Although the 30% quota policy has been implemented as a form of affirmation, its implementation has not been effective because the regeneration process is not based on meritocracy and the organizational culture is still dominated by masculine values. As a result, women are more often placed in symbolic positions without strategic roles, and various structural and cultural barriers contribute to the lack of influence of women in party decision-making.

***Keywords:* Women's Cadre, Political Parties, Women's Representation**

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. TINJAUAN PUSTAKA	8
F. METODE PENELITIAN	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II	20
KERANGKA TEORI.....	20
A. Definisi Konseptual.....	20
B. Teori Rekrutmen Politik	25
C. Teori Supply and Demand.....	28
BAB III.....	30
GAMBARAN OBYEK PENELITIAN.....	30
A. Partai Demokrat	30

B. DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus.....	32
C. Profil Srikandi Partai Demokrat	39
BAB IV	43
POLA KADERISASI PEREMPUAN DALAM PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN KUDUS.....	43
A. Proses kaderisasi perempuan.....	43
1. Rekrutmen perempuan	43
2. Pelatihan dan Pembinaan.....	46
3. Diaspora Kader.....	53
B. Tantangan Kaderisasi Perempuan.....	59
BAB V	66
REPRESENTASI PEREMPUAN DI DALAM KEPENGURUSAN PARTAI DEMOKRAT..	66
.....	66
A. Realitas Representasi Perempuan	66
B. Faktor Penghambat Keterlibatan Perempuan.....	72
BAB VI.....	82
PENUTUP	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kader Perempuan dalam Pemilu 2024

Tabel 3.1 Struktur Pengurus Srikandi Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Srikandi Partai Demokrat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Muscab Partai Demokrat Kab. Kudus

Gambar 4.2 Muscab Partai Demokrat Kab. Kudus

Gambar 1. Wawancara dengan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Gambar 2. Wawancara dengan Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Gambar 3. Wawancara dengan Ketua Srikandi DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Gambar 4. Wawancara dengan Sekretaris Srikandi DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Gambar 5. Wawancara dengan Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang

Gambar 6. Wawancara dengan Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang

Gambar 7. Wawancara dengan Anggota Bidang Komunikasi Strategi Daerah

Gambar 8. Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Kudus

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah partisipasi perempuan dalam dunia politik merupakan sebuah perjalanan yang kompleks. Melihat kembali sejarah pada waktu itu, masyarakat cenderung menganggap remeh ketika perempuan terjun ke dunia politik. Kesadaran akan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial mendorong munculnya fenomena keterlibatan perempuan dalam politik. Hambatan utama partisipasi politik perempuan berasal dari ranah pribadi. Stereotip yang berkembang membatasi peran perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, tanpa melihat potensi mereka di ranah publik. Sistem patriarki yang mengakar kuat menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas kedua yang harus tunduk pada perintah laki-laki. Pandangan ini diperkuat oleh konsep *nature* yang menekankan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipercaya memiliki keunggulan fisik dan kemampuan berpikir rasional yang lebih baik, sehingga dianggap lebih layak menjadi pemimpin dibandingkan dengan perempuan. (Wulandari, 2019 : 3)

Kesadaran terhadap kesenjangan yang dialami perempuan menjadi latar belakang disahkannya UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kemudian, terbitlah Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dengan harapan dapat menghapus marginalisasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Anggraini, 2019: 66-87). Diperlukan upaya lebih untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, diharapkan perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi langkah besar dalam memperbaiki proses politik di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang diusung adalah kewajiban untuk memiliki setidaknya 30% perempuan dalam

kepengurusan partai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Anggraini, 2019: 71).

Demi terciptanya demokrasi yang baik partai politik harus mempunyai kader-kader partai yang berkualitas dengan melalui mekanisme kaderisasi politik. Dengan memiliki kader-kader politik yang berkualitas, partai politik mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader dalam menentukan pemimpinnya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader yang berkompetensi sebagai calon pemimpin politik di pemerintahan. (Ferdian dkk, 2020). Khususnya pada kaderisasi perempuan di Indonesia, kaderisasi perempuan mendapat momentum penting sejak era reformasi dengan diberlakukannya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik. Proses kaderisasi ini mencakup berbagai aspek pengembangan kapasitas, mulai dari pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, hingga pemahaman tentang sistem politik dan pembuatan kebijakan. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, kaderisasi perempuan tetap penting sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam politik dan memastikan aspirasi perempuan terwakili dalam proses pengambilan keputusan publik. (Wulandari, 2019 : 7).

Salah satu partai politik di Kudus yang memiliki fokus pada pengembangan kader perempuan adalah Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Kudus terbentuk pada 2002 yang pada awal mulanya dirintis oleh Ngatmin Alimanda dan sekarang DPC Kudus diketuai oleh Mardijanto sampai 2027. Demokrat sebagai sebuah partai politik di Kudus tentunya melakukan proses kaderisasi terhadap kader-kadernya. Fajri & Efendi (2021) mengatakan bahwa kaderisasi sendiri dimaknai sebagai proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu untuk menanamkan nilai-nilai organisasi. Melalui fungsi kaderisasi, partai politik memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada anggotanya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti diskusi, seminar, hingga mengikuti proses pemilihan untuk menduduki posisi tertentu. Kaderisasi di Partai Demokrat tidak hanya general saja, akan tetapi juga memiliki wilayah khusus dalam kaderisasi perempuan. Kaderisasi perempuan ini diwadahi dalam ruang organisasi sayap yang bernama srikandi. Dimana

srikandi ini menjadi ruang aman dan nyaman untuk kader perempuan yang berproses di Partai Demokrat. Srikandi sendiri pada tahun 2024 total memiliki 57 kader aktif perempuan yang tersebar diberbagai struktural partai mulai dari tingkat ranting sampai pengurus cabang (Wawancara, Santiko, 27 Agustus 2024).

Dalam struktur kepengurusan partai politiknya, masih terdapat ketimpangan representasi gender yang mencolok. Perempuan sering kali hanya ditempatkan pada posisi lapis kedua dan ketiga, seperti sekretaris, bendahara, atau anggota bidang-bidang non-strategis. Sementara itu, posisi-posisi kunci di tingkat pertama seperti ketua umum, sekjen, atau kepala bidang strategis lebih banyak didominasi oleh laki-laki diberbagai tingkatan kepengurusan. Seperti yang disampaikan oleh Ayu Cahya W (Wawancara, 10 April 2025)

“Kader perempuan di sini itu yang berada di dalam struktur partai, ntah di cabang, anak cabang atau ranting pasti posisinya hanya membantu. Sangat jarang yang mempati posisi startegis dan menjadi pimpinan uatama, itu masih sangat jarang dan bisa hitung dengan jari”

Hal ini mencerminkan bahwa partai politik masih menjadikan perempuan sebagai pelengkap simbolik ketimbang pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan. Ketimpangan ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut akses terhadap kekuasaan dan pengaruh. Minimnya keterwakilan perempuan di posisi strategis membuat suara dan perspektif mereka kurang mewarnai arah kebijakan partai. Padahal, keterlibatan perempuan secara setara sangat penting untuk menciptakan politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Salah satu akar persoalan dari minimnya representasi perempuan di posisi strategis partai politik adalah budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam sistem politik Indonesia. Perempuan kerap dianggap tidak cukup kompeten atau tidak memiliki "naluri politik" yang kuat untuk duduk di kursi pengambil keputusan. Pandangan ini tidak hanya datang dari kalangan internal partai, tetapi juga dari masyarakat luas yang masih memiliki bias gender dalam menilai kemampuan kepemimpinan perempuan. Akibatnya, perempuan yang sebenarnya memiliki kapasitas dan pengalaman kerap disisihkan atau tidak diberi ruang untuk berkembang secara maksimal dalam struktur partai. Selain itu, mekanisme

rekrutmen dan kaderisasi partai sering kali tidak ramah terhadap perempuan. Tidak adanya sistem yang mendorong afirmasi secara berkelanjutan menyebabkan perempuan sulit menembus jenjang kepemimpinan utama. Bahkan dalam proses seleksi, perempuan lebih sering dinilai berdasarkan keterhubungan personal atau peran sosialnya, bukan karena prestasi atau gagasan politiknya. Hal ini memperkuat kondisi di mana perempuan tetap berada di posisi pinggiran, dan membuat regenerasi kepemimpinan perempuan dalam partai menjadi stagnan.

Sementara itu, pada pemilu 2024 terdapat 18 kader perempuan dari 45 kader yang mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten Kudus. Berikut data 18 kader perempuan tersebut :

DAPIL	NO. URUT	NAMA LENGKAP
KUDUS 1	3	Erni Alfiaturrohmaniah, S.Pd
KUDUS 1	6	Lailul Munazaroh
KUDUS 1	9	Widya Ayu Pratiwi
KUDUS 1	10	Anik Oktafiani
KUDUS 2	3	Arifatul Chorida, S.T.
KUDUS 2	6	Siska Margaretha, A.md. Keb.
KUDUS 2	9	Meisya Ninda Maulidya
KUDUS 2	10	Efi Nmufita Hafariana
KUDUS 2	11	Ayu Cahya Widianingrum, S.H.
KUDUS 3	2	Karlina Putri Utami, S. Pd.
KUDUS 3	5	Fitria Susilo Susanti, S. Pd.
KUDUS 3	8	Dewi Masruroh

KUDUS 3	10	Arien Prahestie Al Maksum, A. md.
KUDUS 3	11	Fifin Rianawati
KUDUS 4	3	Eva Chorida Amalia, S. E.
KUDUS 4	4	Ari Mursidah
KUDUS 4	9	Siti Maesaroh
KUDUS 4	12	Fitria Arbaina, S. Pd.

Tabel 1.1 Kader Perempuan dalam Pemilu 2024

Sumber: *Data DCT Partai Demokrat Kudus*

Data menunjukkan bahwa perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) masih menghadapi tantangan serius dalam sistem pencalonan internal partai politik. Salah satu persoalan utama adalah penempatan nomor urut yang tidak strategis dalam daftar calon tetap (DCT). Dalam banyak kasus, caleg perempuan cenderung diberikan nomor urut bawah yang memiliki peluang kecil untuk terpilih, terutama di daerah pemilihan yang kompetitif. Penempatan ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam daftar caleg sering kali tidak dimaksudkan untuk benar-benar mendorong keterwakilan mereka, melainkan sekadar memenuhi kewajiban administratif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan yang diatur dalam regulasi pemilu.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa komitmen partai politik terhadap kesetaraan gender masih bersifat formalitas. Meskipun secara kuantitatif perempuan tercantum dalam daftar caleg, secara kualitatif mereka belum diberi kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Nomor urut atas, yang memiliki kemungkinan besar untuk memperoleh kursi legislatif, tetap didominasi oleh caleg laki-laki. Hal ini mempertegas bahwa perempuan belum dianggap sebagai aset politik yang penting, melainkan hanya sebagai pelengkap agar partai tidak tersandung masalah administratif saat verifikasi pencalonan. Jika partai politik benar-benar ingin mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen, maka

perubahan mendasar perlu dilakukan, mulai dari rekrutmen hingga penempatan nomor urut yang berkeadilan. Memberikan nomor urut atas kepada caleg perempuan yang memiliki kapasitas dan rekam jejak jelas merupakan bentuk penghargaan terhadap kualitas, bukan sekadar kuantitas. Tanpa perubahan paradigma ini, tujuan dari kebijakan afirmatif tidak akan tercapai secara substansial, dan keterwakilan perempuan akan terus menjadi simbol tanpa pengaruh nyata dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan politik.

Oleh karena itu, penting kiranya mengkaji proses kaderisasi dan rekrutmen perempuan dalam partai politik Demokrat di Kudus. Sehingga akan berfokus tentang bagaimana kaderisasi perempuan dijalankan dan bagaimana tahapan rekrutmen yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan prinsip *affirmative action* yang ideal atau justru *stereotip* yang diskriminatif masih sangat melekat pada budaya demokrasi lokal di Kudus. Dalam konteks ini akan dikaji pula berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural partai, apakah perempuan hanya sekedar benar-benar menjadi pelengkap atau memang menjadi proses perempuan sebelum menempati posisi strategis partai. Berdasarkan keadaan yang tergambar di atas, penulis menganggap hal tersebut penting untuk diteliti, agar dapat diketahui jawaban tentang fenomena proses kaderisasi perempuan yang dilakukan Partai Demokrat di Kudus dan representasi perempuan dalam sktruktural partai. Dalam mengkaji problematika tersebut proposal penelitian ini penulis ber judul “Pola kaderisasi perempuan dalam politik di tingkat lokal : studi kasus partai demokrat kabupaten kudus tahun 2019-2024”.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang menitikberatkan pada pola kaderisasi perempuan dalam partai politik di tingkat lokal. Penelitian ini mengambil Partai Demokrat di Kabupaten Kudus selama periode 2019-2024 sebagai objek studi kasus. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kaderisasi perempuan dalam Partai Demokrat di Kabupaten Kudus?

2. Bagaimana representasi perempuan di dalam kepengurusan Partai Demokrat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun praktik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan yang ingin diraih oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kaderisasi Perempuan Partai Demokrat di Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui representasi perempuan di dalam kepengurusan Partai Demokrat

D. MANFAAT PENELITIAN

Terdapat dua jenis manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjadi salah satu inspirasi pemikiran atau wawasan yang lebih luas untuk menambah pengetahuan keilmuan politik terutama berkaitan dengan tema pola kaderisasi perempuan di partai politik lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana kontestasi kader perempuan Partai Demokrat dalam pemilu 2024.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi data dan informasi yang dapat membantu penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan kaderisasi partai politik di tingkat lokal. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau acuan bagi akademisi dan praktisi politik untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembangunan partai politik, terkhusus mengenai pola kaderisasi profesional yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas SDM dalam dinamika demokrasi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian yang berfokus pada pola kaderisasi partai politik di tingkat lokal, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai rujukan. Berikut ini adalah beberapa pustaka yang terkait dengan subjek penelitian dan berfungsi sebagai rujukan, yaitu:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis Azzahra (2021) yang berjudul *“Kaderisasi Partai Politik (Analisis Kaderisasi Digital dalam Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia)”*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini fokus menjelaskan mengenai latar belakang dan strategi kaderisasi dalam Sekolah Kader Solidaritas Indonesia yang diselenggarakan oleh PSI. Lahirnya Sekolah Kader Solidaritas Indonesia selain berawal dari pelatihan digital adalah memanfaatkan faktor keterbatasan dana untuk melakukan kaderisasi secara nasional yang memerlukan banyak anggaran. Selain menjalankan kaderisasi digital melalui Sekolah Kader Solidaritas Indonesia, PSI juga melakukan informal dalam bentuk pelatihan tatap muka yang berfokus pada pengurus partai dengan melalui bimbingan professional yang biasa disebut dengan Info Session.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Fajri dan Effendi Hasan (2021) tentang *Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra: Studi Kasus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta fokus penelitiannya untuk mengetahui proses kaderisasi yang dilakukan dan mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan kursi dewan DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori partai politik, teori elektabilitas dan konsep kaderisasi. Instrumen tersebut untuk menjawab pertanyaan apa yang dikerjakan Partai Gerindra dalam proses kaderisasi dan apakah berdampak pada peningkatan elektabilitas atau jumlah kursi dewan di Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan melalui dua sistem kaderisasi, yaitu pengkaderan umum dan khusus. Kaderisasi umum ini ditunjukan kepada kader fungsional partai struktural ditingkat madya atau kecamatan berkaitan dengan kinerja-kinerja politik partai. Sedangkan kaderisasi khusus diperuntukan secara

khusus terhadap kader-kader partai yang dipersiapkan untuk mencapai posisi-posisi strategis dalam pemilu. Dengan begitu adalah keberhasilan penambahan kursi dewan dalam pemilu kali ini sangat dipengaruhi oleh sistem kaderisasi yang berjalan dipartai.

Ketiga, jurnal dengan judul *Model Kaderisasi Partai Politik melalui Sayap Partai* yang ditulis oleh Ferdian, dkk (2020). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, berfokus pada tiga partai politik yaitu, Gerindra, Nasdem, dan PKS. Tujuan utamanya adalah menganalisis model kaderisasi yang diterapkan oleh partai-partai tersebut melalui organisasi sayap mereka. Penelitian ini menggunakan teori yang didasarkan pada konsep partai politik, dengan penekanan khusus pada prinsip-prinsip kaderisasi yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing partai memiliki organisasi sayap partai. Gerindra dengan Gerindra Masa Depan (GMD), Nasdem dengan Garda Pemuda Nasdem, dan PKS dengan Garuda Keadilan. Dari ketiga partai tersebut, PKS menerapkan model kaderisasi tertutup yang mengutamakan calon anggota dengan nilai-nilai religius dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Sebaliknya, Gerindra dan Nasdem mengadopsi model kaderisasi terbuka dan non-diskriminatif. Meskipun demikian, ketiga partai memiliki kesamaan dalam menerapkan sistem kaderisasi berjenjang.

Keempat, skripsi oleh Hartoni (2021) tentang *Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung: Studi Pada Partai Perindo dan Partai Berkarya*. Metode dalam studi ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan fokus penelitian menganalisis pola pembinaan kaderisasi yang diterapkan oleh Partai Perindo dan Partai Berkarya di Provinsi Lampung. Kerangka teoretis penelitian ini berlandaskan pada konsep partai politik dan kaderisasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua partai menganut prinsip kaderisasi yang terbuka, non-diskriminatif, dan berjenjang. Mereka juga berupaya menciptakan pola pembinaan yang mencakup seluruh tingkatan kader. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan kedua partai untuk melakukan perekrutan secara instan, tanpa memberikan pendidikan politik yang memadai kepada calon kader terlebih dahulu. Menariknya, kedua partai ini berusaha menerapkan kebijakan affirmative action dalam proses perekrutan dan pembinaan

kader perempuan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam partai politik, parlemen, dan berbagai jabatan publik.

Kelima, jurnal tentang *Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo* yang ditulis oleh Shobari (2018). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang dikaji dalam realitas yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada mengetahui pola kaderisasi perempuan yang berjalan di pada Partai Golkar dan PKB dan meingkatkan partisipasi perempuan. Teori yang dipergunakan adalah tentang partai politik. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Partai Golkar dan PKN memiliki pola kaderisasi yang bersifat umum, dimana laki-laki dan perempuan bisa ikut berpartisipasi. Dalam pola kaderisasi yang berjalan memiliki jenjang pendidikan, mulai tingkat bawah, menengah dan atas. Namun dalam AD/ART kedua partai tersebut belum ada tentang kaderisasi khusus perempuan. Sedangkan gari segi tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif Partai Golkar memiliki 2 wakil dan PKB tidak ada.

Keenam, Rekrutmen Perempuan. Diantara kajian yang telah dilakukan oleh para ilmuan terkait dengan rekrutmen Perempuan yang masuk dalam kategori tema ini adalah jurnal yang ditulis oleh Anggraini (2019) tentang *Rekrutmen Kandidat Perempuan oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Studi ini berfokus pada proses rekrutmen calon kepala daerah perempuan oleh partai politik. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori partai politik dan rekrutmen politik dalam konstelasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Kesimpulan yang didapatkan bahwa partai PKB dan PAN sama-sama memiliki mekanisme dan tahapan dalam proses rekrutmen kepala daerah dimulai dari seleksi kandidat ditingkat daerah yang bersifat inklusif, sehingga proses usulan sangat terbuka untuk figur-figur perempuan untuk ikut serta dalam proses rekrutmen tersebut. Meskipun pada tahap akhir, calon yang diusung ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang bersifat sentralistik eksklusif. Dengan figur perempuan yang diusung akhirnya mampu menjadi pemenang dalam Pilkada Kabupaten Muaro Jambi untuk periode 2017-2022.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Jamri (2018) tentang *Eksistensi Perempuan di Partai Lokal Kota Banda Aceh (Studi Kasus: Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh)*. Penelitian ini mengkaji keberadaan perempuan dalam partai-partai lokal di Banda Aceh, dengan fokus pada Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Daerah Aceh. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses perekrutan, pembinaan kader, dan strategi pemenangan kandidat perempuan. Objek penelitian meliputi Dewan Perwakilan Wilayah dari ketiga partai tersebut. Analisis dilakukan menggunakan teori partisipasi, gender, partai politik lokal, dan kaderisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen dan kaderisasi masih dipengaruhi faktor primordial seperti hubungan keluarga, latar belakang pendidikan, dan status sosial. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam keanggotaan partai dan pencalonan legislatif sangat rendah. Strategi pemenangan ketiga partai mengharuskan calon legislatif perempuan untuk berkolaborasi dengan calon di tingkat yang lebih tinggi, yaitu calon anggota DPRK (tingkat kabupaten) dan DPRA (tingkat provinsi).

Kedelapan, studi lain ditulis oleh Wulandari (2019) dalam skripsi dengan judul *Perempuan dan Partai Politik: Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya (golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan sistem dan mekanisme pola rekrutmen caleg-calegnya. Dengan fokus untuk mengetahui pola rekrutmen dan penyebab ketiadaan anggota legislatif perempuan. Lokus kajian ini adalah Partai Golkar Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, studi ini bertujuan untuk menggambarkan sistem dan mekanisme rekrutmen caleg, serta mengidentifikasi penyebab ketiadaan anggota legislatif perempuan. Penelitian ini menggunakan teori gender dan rekrutmen politik sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen caleg di Partai Golkar bersifat semi terbuka. Artinya, partai lebih mengutamakan kader internal dan mereka yang memiliki kedekatan dengan elit partai, namun tetap membuka peluang bagi masyarakat umum dengan syarat memiliki keaktifan organisasi, pengalaman, dan kompetensi yang relevan. Ketidadaan caleg perempuan di Partai Golkar Tangerang Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu, kendala politik pribadi yang dihadapi perempuan, aturan hukum yang kurang berpihak pada perempuan

secara menyeluruh, persaingan ketat di internal partai, budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan Partai Golkar, dan lemahnya modal sosial yang dimiliki perempuan. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada rendahnya representasi perempuan dalam pencalonan legislatif di Partai Golkar Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014.

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Nisak (2022) tentang *Rekrutmen Perempuan dalam Partai Politik: Studi Komparasi PDI Perjuangan dan PKB Kabupaten Demak*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses rekrutmen di kedua partai, dengan mempertimbangkan perbedaan basis ideologi mereka. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori partai politik, gender, dan rekrutmen politik. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam strategi rekrutmen perempuan antara kedua partai. dalam hal ideologi PDI Perjuangan tidak mewajibkan kesamaan ideologi, sementara PKB mensyaratkan. PDI Perjuangan menerapkan pola rekrutmen terbuka untuk calon anggota dan pejabat publik, serta tertutup untuk pengurus partai, sementara PKB cenderung menggunakan pola tertutup di semua tingkatan. PDI Perjuangan lebih banyak memanfaatkan media digital, sedangkan PKB menggunakan pendekatan personal. Dalam perekrutan pejabat publik, PDI Perjuangan menjalani proses seleksi ketat, sedangkan PKB hanya melalui tahapan penjangkaran tanpa seleksi. PDI Perjuangan fokus pada kualitas kader, sedangkan PKB lebih menekankan keterwakilan 30% perempuan, dengan agenda khusus untuk perempuan melalui sayap partai, Perempuan Bangsa.

Dari beragam studi yang mengkaji tentang kaderisasi partai politik maupun rekrutmen perempuan, umumnya lebih banyak mengkaji sistem kaderisasi partai politik secara general dan beberapa ada yang berfokus pada subjek perempuan. Namun, hanya sebatas dalam ruang rekrutmen pemilu/pilkada yang sangat terbatas prosesnya. Sehingga kekurangan kajian secara komprehensif bagaimana pola kaderisasi perempuan dijalankan dan bagaimana representasi kader perempuan dalam struktural partai. Pada ranah ini lah yang akan menjadi ruang lingkup kajian dari penelitian ini. Lebih dari itu, sebagaimana dijelaskan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini juga akan memberi fokus kajian pada

bentuk isu-isu yang muncul berkaitan dengan kaderisasi perempuan. Namun, studi ini hanya dibatasi untuk membahas kaderisasi perempuan pada Partai Demokrat Kabupaten Kudus tahun 2019-2024.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memungkinkan pemahaman dan eksplorasi yang mendalam terhadap isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Moleong memberikan definisi penelitian kualitatif sebagai suatu upaya untuk memahami pengalaman subjek penelitian melalui deskripsi verbal dalam konteks alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi lapangan (Moleong, 2014: 16). Sementara itu, Muri Yusuf (2014: 328) menggambarkan penelitian kualitatif sebagai strategi yang menekankan pada pencarian makna, konsep, karakteristik, dan deskripsi fenomena alamiah, yang disajikan dalam bentuk narasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena melalui penggambaran deskriptif menggunakan kata-kata. Dalam konteks penelitian ini, metodologi yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan atau komponen, yang akan diuraikan lebih lanjut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan fokus pada pendekatan studi kasus. Menurut Chariri (2019) penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks kehidupan nyata dengan tujuan menyelidiki dan memahami fenomena secara mendalam, meliputi apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Pendekatan ini bersifat eksploratif dan melibatkan studi mendalam yang berorientasi pada kasus. Desain penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan pelaksanaan penelitian di lapangan. Peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data, baik melalui pencatatan maupun perekaman, serta analisis informasi yang diperoleh dari para informan.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang menggambarkan perilaku subjek yang diamati. Studi kasus, sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif deskriptif, berfokus secara intensif pada satu objek tertentu. Nawawi (2003) menyatakan bahwa

data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai pihak terkait, namun hasil penelitiannya hanya berlaku untuk kasus yang diteliti. Sementara itu, Arikunto (1993) menjelaskan bahwa metode studi kasus melibatkan penelitian yang intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga, atau fenomena tertentu dalam lingkup yang terbatas. Dengan demikian, studi kasus mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan kasus tersebut, namun hasil penelitiannya spesifik dan terbatas pada kasus yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer menurut Husein Umar adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu atau perseorangan contohnya, hasil dari wawancara, atau yang berasal dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013). Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan diperoleh dari kegiatan wawancara secara mendalam kepada informan. Wawancara adalah kegiatan untuk menggali informasi melalui tanya jawab dengan individu dengan tujuan mendapatkan keterangan atau pendapat atas suatu hal. Penulis menggunakan Teknik wawancara mendalam sebagai dasar untuk mengelaborasi topik penelitian yang menjadi pembahasan.

b. Data Sekunder

Menurut Kuncoro, data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan peneliti dapat mengaksesnya melalui berbagai sumber yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Singkatnya, data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan tidak memerlukan pengumpulan langsung oleh peneliti (Kuncoro, 2009: 145). Sugiyono menambahkan bahwa data sekunder diperoleh pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui perantara atau dokumen. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Dengan demikian, data sekunder berperan sebagai pendukung dan

pelengkap data utama atau data primer yang diperoleh melalui pengumpulan data langsung (Sugiyono, 2016: 225).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, bukan oleh peneliti itu sendiri. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, publikasi, atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara umum, data sekunder dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk memperkaya dan memperkuat penelitian, terutama ketika data primer tidak mencukupi atau memerlukan dukungan dari data tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono berpendapat bahwa proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan beragam sumber, dan dalam berbagai kondisi atau setting yang berbeda. Tahap pengumpulan data ini merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sugiyono (2019: 224) menekankan bahwa tanpa pengetahuan yang cukup tentang teknik-teknik pengumpulan data, seorang peneliti akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Lebih lanjut, Sugiyono (2019: 231-240) menjabarkan beberapa metode pengumpulan data yang sering digunakan oleh para peneliti, di antaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan pondasi dari semua disiplin ilmu. Dalam proses ini, data dikumpulkan menggunakan berbagai instrumen, yang memungkinkan fokus penelitian terlihat dengan jelas. Tahap observasi dilaksanakan dengan tujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan, melibatkan pengamatan cermat dan pencatatan fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, metode observasi dimanfaatkan untuk memperoleh data mengenai dua aspek utama: pertama, bagaimana pola kaderisasi perempuan Partai Demokrat di Kabupaten Kudus dan kedua, bagaimana dampak dari proses kaderisasi tersebut terhadap

perolehan suara Partai Demokrat di Kabupaten Kudus pada pemilihan umum tahun 2024. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika politik lokal dan efektivitas strategi partai dalam meningkatkan dukungan pemilih.

b. Wawancara

Sugiyono (2019: 231) menyatakan bahwa wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam dua situasi utama. Pertama, ketika peneliti perlu melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Kedua, ketika peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan mendalam dari sumber informasi. Metode ini bergantung pada laporan atau keterangan yang diberikan langsung oleh narasumber, berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi mereka.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menerapkan metode wawancara melalui interaksi tanya jawab langsung dengan narasumber. Peneliti memilih format wawancara terstruktur, di mana sebelumnya telah dipersiapkan panduan pertanyaan yang sistematis. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi berfungsi sebagai metode tambahan untuk mengumpulkan data, melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2019: 240), temuan penelitian yang dihasilkan dari observasi dan wawancara akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi jika didukung oleh berbagai dokumen relevan, seperti catatan sejarah, gambar, atau karya-karya akademik dan seni yang telah ada sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, studi dokumentasi dimanfaatkan untuk mengakses informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau wawancara langsung. Secara khusus, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait profil Partai Demokrat. Dengan demikian, studi dokumentasi berperan sebagai sumber data pelengkap yang

memperkuat dan memperkaya informasi yang didapat dari metode-metode lainnya. Dokumen-dokumen yang dikaji dapat menyediakan bukti nyata, meningkatkan kredibilitas, dan memperkuat validitas data dalam penelitian kualitatif ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses terstruktur untuk mengolah informasi yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi lapangan, dan penelusuran dokumen. Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain mengelompokkan data, membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menggabungkan kembali, mengidentifikasi pola, menentukan aspek-aspek penting untuk ditelaah, dan akhirnya menarik kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang jelas, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang membaca hasil penelitian.

Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data berlangsung dalam tiga fase: pra-lapangan, saat di lapangan, dan pasca-lapangan. Fase pra-lapangan melibatkan analisis data awal atau sekunder untuk menentukan arah penelitian. Fase lapangan meliputi analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Fase pasca-lapangan mencakup analisis yang dilakukan setelah periode pengumpulan data selesai. Dengan melakukan analisis data secara sistematis dan menyeluruh pada ketiga tahap tersebut, peneliti dapat memaknai dan memahami data yang diperoleh dengan lebih mendalam, sehingga dapat menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan alasan memilih topik penelitian tentang pola kaderisasi perempuan dalam partai politik di tingkat lokal, dengan fokus pada

studi kasus Partai Demokrat di Kabupaten Kudus periode 2019-2024. Selain itu, juga memaparkan pernyataan masalah yang akan dikaji, dari pernyataan masalah tersebut penulis menyusun dua pertanyaan penelitian dan tujuan serta manfaat penelitian. Untuk memastikan penelitian ini original sesuai dengan analisis standar ilmiah, maka dalam bab ini juga dilakukan kajian pustaka dan langkah-langkah metode penelitian yang kemudian dipaparkan secara sistematis penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Pada bab ini bertujuan untuk mengulas lebih lanjut mengenai kerangka teoritis yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan dua teori yaitu, teori kaderisasi dan teori partai politik sebagai pondasi dalam menjawab pertanyaan penelitian terkait pola kaderisasi Partai Demokrat di Kabupaten Kudus. Teori ini akan digunakan untuk memahami dan mengevaluasi proses kaderisasi perempuan dalam partai politik di tingkat lokal. Penulis akan menjelaskan konsep-konsep kunci dalam kaderisasi, seperti tahapan kaderisasi, metode pengembangan kader, dan indikator keberhasilan kaderisasi. Selanjutnya penulis akan menjabarkan bagaimana teori ini akan diterapkan dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

BAB III Profil Partai Demokrat di Kabupaten Kudus

Bab ini berisi gambaran umum penelitian, seperti profil Partai Demokrat, ketua Partai Demokrat di Kabupaten Kudus, kursi Perempuan dari tahun 2019-2024, Sejarah partai Demokrat di Kabupaten Kudus, dan data lainnya yang berkaitan dengan pola kaderisasi Perempuan dalam partai politik di Tingkat lokal.

BAB IV Pola Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Demokrat di Kabupaten Kudus

Dalam bab ini memaparkan tentang hasil dari penelitian secara rinci perihal pola kaderisasi Perempuan dalam Partai Demokrat di Kabupaten Kudus.

BAB V Representasi Perempuan di dalam Partai Demokrat

Pada bab ini peneliti bertujuan untuk menjelaskan hasil dari penelitian secara rinci perihal bagaimana representasi perempuan di dalam Partai Demokrat itu berjalan dan juga membahas mengenai faktor penghambat keterlibatan perempuan.

BAB VI Penutup

Dalam bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan juga saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi Konseptual

1. Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi merupakan proses pemilihan individu-individu dari kalangan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik dan menduduki jabatan pemerintahan. Proses ini dilakukan melalui berbagai cara seperti tampil di media komunikasi, bergabung dengan organisasi tertentu, mencalonkan diri untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu, dan lain sebagainya (Saputra, 2017). Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa kaderisasi adalah upaya untuk merekrut dan menyaring orang-orang dari masyarakat umum untuk diikutsertakan dan ditempatkan pada posisi-posisi penting dalam ranah politik dan pemerintahan. Bung Hatta pernah mengatakan tentang kaderisasi dalam kerangka kebangsaan, “kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit”. Artinya, untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang kompeten di masa depan, pemimpin pada masanya harus dipersiapkan.

Proses kaderisasi memiliki peran krusial dalam setiap organisasi. Signifikansinya terletak pada fungsinya sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas kepemimpinan secara intensif. Melalui kaderisasi, organisasi dapat mempersiapkan generasi penerus yang akan memimpin di masa mendatang. Tujuan utama kaderisasi adalah menghasilkan individu-individu yang memiliki kesiapan untuk melanjutkan visi serta misi organisasi dan mengambil peran kepemimpinan di kemudian hari. Kaderisasi bukan hanya proses pelatihan biasa, tetapi merupakan investasi jangka panjang organisasi dalam memastikan kesinambungan dan perkembangan di masa depan. Proses ini membantu organisasi dalam membangun fondasi kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kaderisasi berperan penting dalam melahirkan kader-kader yang berkualitas dan memiliki kapasitas memadai untuk memimpin organisasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kaderisasi merupakan nyawa atau jantung dari sebuah organisasi. Tanpa adanya proses kaderisasi yang baik, organisasi akan kesulitan untuk memperoleh pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan

mampu membawa organisasi mencapai tujuannya dimasa depan (Partanto & Al Barry, 1994).

Dalam lingkup partai politik, kader politik merupakan afiliasi partai politik yang memiliki hak dan kewajiban. Partai politik harus melakukan proses kaderisasi untuk mendapatkan hak istimewa tersebut. Sederhananya, kaderisasi partai politik adalah intervensi partai politik terhadap individu atau calon anggota untuk membantu mereka menjadi lebih baik dan lebih mampu melaksanakan peran dan fungsi partai (Muhammad, 2016: 110-120). Selain itu, dalam dunia politik, proses kaderisasi juga digunakan untuk mempersiapkan masyarakat atau individu yang ingin menjadi anggota partai dan menjadi pemimpin di tingkat nasional atau lokal. Proses kaderisasi yang efektif harus didasarkan pada sistem yang terbuka dan dapat diakses oleh semua kader yang berpotensi. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu berbakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam partai. Bersamaan dengan itu, partai juga perlu membangun sistem internal yang sehat dengan tujuan untuk membiasakan para kader dengan lingkungan yang mendukung integritas dan keterbukaan. Dengan menggabungkan kedua elemen ini - sistem kaderisasi yang transparan dan sistem partai yang sehat - partai politik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menghasilkan calon pemimpin berkualitas tinggi.

Pengembangan kader merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya berada di pundak elit atau jajaran kepemimpinan tertinggi partai, melainkan menjadi usaha kolaboratif dari seluruh elemen struktural organisasi untuk menjamin kesinambungan dan ketangguhan partai secara menyeluruh. Di negara dengan sistem demokrasi yang telah mapan, proses kaderisasi dalam partai politik memegang peranan penting dalam mempersiapkan kandidat pemimpin, pengurus partai, dan pejabat publik yang berkualifikasi. Partai menyelenggarakan program kaderisasi terstruktur, seperti pelatihan dan edukasi politik, untuk mengembangkan kompetensi anggotanya sesuai dengan posisi yang akan diemban, baik sebagai politikus, pengelola organisasi partai, maupun calon pejabat publik. Contoh konkret dapat ditemukan dalam model kaderisasi partai politik di Inggris, khususnya pada Partai Buruh yang mengimplementasikan sistem kaderisasi komprehensif terhadap anggotanya.

Bentuk kaderisasi yang diterapkan mencakup program pelatihan dan pendidikan politik khusus yang diperuntukkan bagi seluruh anggota, termasuk komponen perempuan dan generasi muda partai. Program pelatihan ini memiliki jenjang dan konten yang bervariasi, bergantung pada tujuan spesifik dari pelatihan tersebut. Sebagai contoh, terdapat modul pelatihan yang dirancang untuk membentuk politisi, termasuk bagaimana menjadi pengurus partai yang efektif maupun kandidat untuk jabatan publik.

Dalam panduan perekrutan dan pembinaan kader partai politik menekankan bahwa proses kaderisasi harus didasarkan pada program pembinaan dan pengembangan yang terstruktur, terukur, sistematis, dan menyeluruh. Proses ini harus mencakup seluruh tingkatan kader, dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

- a. Penerapan sistem tata kelola yang mengatur norma, peraturan, dan kelembagaan dalam pelaksanaan kaderisasi, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Penerapan metode perekrutan yang mengedepankan prinsip demokratis dan keterbukaan.
- c. Pelaksanaan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembinaan dan pengembangan kader.
- d. Pengembangan jaringan kerja antar kader melalui interaksi yang bertujuan meningkatkan kualitas, sehingga terbentuk kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi.
- e. Penerapan tindakan afirmatif dalam perekrutan dan pengkaderan perempuan, sebagai upaya meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan representasi mereka dalam partai politik dan jabatan publik lainnya.
- f. Pengembangan model kaderisasi perempuan yang selaras dengan kebutuhan partai, baik dari segi strategi, materi, maupun metode.

2. Prinsip Kaderisasi

Proses kaderisasi partai politik dapat dilaksanakan secara efektif jika terjadi prinsip-prinsip berikut diterapkan dengan baik:

a. Terbuka

Asas keterbukaan menekankan bahwa proses pembinaan kader harus dapat diakses oleh semua anggota partai politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota memiliki peluang yang setara dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan pengembangan kader. Lebih lanjut, proses pembinaan kader harus terbuka bagi anggota resmi partai, anggota organisasi sayap partai yang berpotensi, dan individu yang telah memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan partai secara demokratis. Semua kelompok ini harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kader di berbagai tingkatan organisasi.

b. Non-Diskriminatif

Memberikan akses yang adil dalam proses kaderisasi berarti mekanisme tersebut harus memberikan peluang yang setara bagi semua anggota untuk berpartisipasi dan berkembang dalam karier politik tanpa memandang ras, kelompok, agama, gender, atau suku. Prinsip ini juga dapat mengurangi pengaruh oligarki partai dalam pemilihan kandidat pada pemilu.

c. Berjenjang

Proses kaderisasi partai politik disusun berdasarkan struktur yang bertingkat atau berbentuk piramida. Misalnya, tingkatan ini dapat dibagi menjadi kaderisasi dasar, menengah, dan lanjutan, atau istilah lainnya. Alasan rasional di balik model hierarki ini didasari oleh dua faktor: pertama, tahapan materi kaderisasi yang berbentuk piramida, dan kedua, tahapan karier dalam organisasi yang juga mengikuti struktur piramida.

3. Model Kaderisasi

Kaderisasi dalam partai politik terbagi menjadi dua model, yaitu kaderisasi untuk anggota partai politik dan kaderisasi untuk non anggota partai politik. Berikut penjelasan lebih detailnya:

a. Anggota Partai Politik

Pada umumnya, setiap partai politik menyelenggarakan program kaderisasi untuk para anggotanya. Dalam partai-partai yang menganut

sistem modern, anggota yang telah terdaftar dan secara konsisten membayar iuran selama jangka waktu tertentu akan secara otomatis menerima pelatihan yang sesuai dengan tujuan partai. Di partai-partai dengan struktur politik yang mapan, kaderisasi dirancang untuk membentuk kader yang selaras dengan visi dan misi partai. Proses ini dijalankan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Namun, kondisi di Indonesia masih belum ideal. Banyak partai yang melaksanakan kaderisasi secara sporadis, umumnya hanya menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, dengan tujuan utama memenangkan partai atau mempersiapkan calon anggota legislatif. Padahal, kaderisasi yang terstruktur tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas anggota, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur potensi anggota dan sebagai indikator untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai dan struktur partai telah terinternalisasi dalam diri anggota partai.

b. Non Anggota Partai Politik

Organisasi sayap partai merupakan sumber penting lainnya dalam proses kaderisasi partai politik. Berbeda dengan sumber kaderisasi dari organisasi masyarakat umum, organisasi sayap partai memiliki keunggulan dalam mempermudah penyebaran ideologi partai dan pembentukan sifat militansi anggota. Hal ini dikarenakan organisasi sayap merupakan bagian integral dari struktur partai politik. Peran organisasi sayap sangat krusial dalam mengimplementasikan, mensosialisasikan, dan menyebarluaskan program serta kebijakan partai. Contoh organisasi sayap partai dapat mencakup organisasi pemuda, mahasiswa, perempuan, profesi, dan keagamaan.

Proses kaderisasi yang dilakukan melalui organisasi sayap partai juga berkontribusi dalam memperluas basis dukungan partai. Partai politik membentuk dan memberdayakan organisasi sayap atau *underbow* sebagai instrumen strategis untuk meraih simpati dan dukungan publik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan

peluang kemenangan dalam pemilihan umum serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai kepada masyarakat luas.

B. Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Phillip Altof

Perekrutan merupakan proses seleksi dan pencarian individu-individu baru untuk menjamin kontinuitas organisasi, baik dalam lembaga pemerintahan, partai politik, maupun berbagai bentuk organisasi lainnya. Meskipun demikian, terminologi rekrutmen lebih dikenal secara luas dalam domain politik, seperti yang dijelaskan dalam karya Dasar-Dasar Ilmu Politik yang mendefinisikannya sebagai strategi terencana untuk menemukan individu-individu potensial dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam aktivitas politik sebagai anggota partai politik (Miriam Budiardjo, 2008). Konsep rekrutmen ini dimaknai secara komprehensif untuk menggambarkan rangkaian pelatihan atau pembinaan serta persiapan kepemimpinan yang terbuka bagi masyarakat, pembentukan badan legislatif pemerintahan, serta pengembangan berbagai fungsi oleh anggota partai dan kompetensi dalam kontestasi pemilihan. (Primasari, 2020)

Rekrutmen politik didefinisikan sebagai proses pengangkatan dan penyeleksian individu atau kelompok untuk menjalankan berbagai peran dalam sistem politik secara umum dan pemerintahan secara khusus. Istilah ini juga merujuk pada fungsi seleksi warga negara untuk aktivitas politik dan posisi pemerintahan melalui saluran komunikasi, keanggotaan organisasi, pencalonan diri untuk jabatan tertentu, dan sebagainya. Setiap sistem politik memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, calon yang direkrut diharapkan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan jabatan politik yang akan diemban. Tiap-tiap partai menerapkan metode rekrutmen yang bervariasi. Rekrutmen politik juga dapat dipahami sebagai proses yang membuka peluang partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Bagi partai politik, rekrutmen berfungsi sebagai metode menjaring anggota bertalenta untuk ditempatkan pada posisi strategis, termasuk sebagai pemimpin daerah. Dalam pelaksanaannya, setiap partai politik memiliki prosedur dan persyaratan khusus dalam proses rekrutmen.

Michael Rush dan Phillip Althoff dalam teori rekrutmen politik mereka mengidentifikasi beragam variasi dalam sistem perekrutan. Dalam buku mereka yang berjudul *"Pengantar Sosiologi Politik"*, Rush dan Althoff memaparkan

berbagai sistem rekrutmen politik yang menunjukkan kompleksitas proses tersebut, yaitu;

1. Seleksi pemilihan melalui ujian atau pelatihan

Seleksi melalui ujian dianggap sebagai komponen vital dalam proses perekrutan. Ujian atau program pelatihan merupakan metode rekrutmen yang diterapkan secara luas di berbagai partai politik, umumnya diimplementasikan untuk mengisi posisi dalam birokrasi dan administrasi. Dalam konteks partai politik, ini dikenal sebagai pendidikan kader partai melalui program pelatihan terstruktur. Pendekatan ini memiliki variasi yang beragam dan banyak di antaranya memiliki konsekuensi signifikan terhadap proses rekrutmen politik. Sebelum mengevaluasi metode mana yang paling efektif, perlu digarisbawahi beberapa hal penting terkait dengan metode-metode alternatif yang terkadang digunakan, yang dalam beberapa konteks masih dipandang sebagai elemen penting dalam berbagai sistem politik.

2. Seleksi melalui penyortiran

Metode pengundian atau sistem seleksi penyortiran merupakan teknik yang telah lama digunakan dan paling umum diterapkan untuk mengukuhkan posisi kepemimpinan politik.

3. Seleksi melalui rotasi atau giliran

Salah satu metode yang digunakan untuk mencegah monopoli kekuasaan atau dominasi posisi penting oleh individu atau kelompok tertentu adalah melalui sistem rotasi atau giliran. Metode ini, yang sering disebut sebagai sistem "pilih kasih" di Amerika Serikat, pada dasarnya merupakan mekanisme perekrutan yang bersifat bergilir. Di berbagai negara lain, sistem ini dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, yang dirancang untuk memastikan adanya perputaran personel di jajaran eksekutif. Pendekatan ini merupakan bentuk yang diterapkan pada sistem yang menggunakan format kepemimpinan kolektif. Dalam masyarakat yang memiliki polarisasi politik yang kuat, untuk menghindari konflik baik di tingkat partai politik maupun pemerintahan negara, diperlukan implementasi sistem rotasi atau giliran.

4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan

Metode perebutan kekuasaan melalui penggunaan atau ancaman kekuatan merupakan bentuk transisi politik yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan. Konsekuensi langsung dan paling nyata dari metode ini adalah terjadinya pergantian para pejabat politik dan perubahan mendasar dalam komposisi personel birokrasi pemerintahan.

5. Seleksi dengan cara patronage

Sebuah sistem yang masih memegang peranan penting hingga saat ini di berbagai negara berkembang, yang dahulu juga eksis di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19, mekanisme ini merupakan komponen dari jaringan penyuapan dan korupsi yang kompleks. Dengan pendekatan yang telah tertata baik, sistem ini memengaruhi pelaksanaan otoritas politik melalui berbagai bentuk pengawasan terhadap hasil pemilihan umum, sebagian berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik, karena hasilnya dapat diprediksi melalui sistem patronase. Namun demikian, patronase dianggap menyesatkan karena dirancang secara khusus untuk memperoleh dan mempertahankan kendali politik dengan cara yang pasti.

6. Seleksi melalui koopsi

Sebuah metodologi yang lebih spesifik dimana para pemimpin yang sudah menduduki jabatan memiliki kapasitas untuk mendukung proses perekrutan kategori pemimpin tertentu adalah melalui mekanisme koopsi (seleksi anggota baru). Koopsi mencakup proses pemilihan ke dalam suatu lembaga yang dilakukan oleh anggota-anggota yang telah ada sebelumnya.

Terkait dengan mekanisme rekrutmen partai politik dalam konsep Rush dan Althoff, proses perekrutan politik memiliki dua karakteristik utama:

1. Sistem terbuka: rekrutmen terbuka merupakan sistem yang berdasarkan pada ujian/seleksi yang dilaksanakan secara transparan dan terbuka.
2. Sistem tertutup: rekrutmen tertutup mengacu pada sistem rekrutmen melalui mekanisme administratif yang berbasis pada sistem patronase.

Setiap sistem politik menerapkan prosedur atau mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda. Kandidat yang berhasil melewati proses rekrutmen adalah mereka yang memiliki kapabilitas atau bakat yang sesuai dengan kebutuhan posisi politik yang dituju. Tiap partai politik juga menerapkan pola rekrutmen khas yang membedakannya dari partai politik lainnya.

Sistem rekrutmen politik menurut Althoff dan Rush dapat dikategorikan menjadi dua metode utama. Pertama, rekrutmen terbuka, yang menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Penilaian dilakukan melalui proses dengan kriteria yang telah ditetapkan dan berdasarkan perhitungan yang objektif dan rasional. Setiap individu yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk posisi politik tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti persaingan secara adil. Kedua, rekrutmen tertutup, di mana peluang untuk berpartisipasi dalam proses pengisian jabatan politik tidak merata bagi semua masyarakat, yang berarti hanya individu-individu tertentu yang dapat mengakses posisi politik yang tersedia.

C. Teori Supply and Demand (Norris dan Lavenduski, 1995)

Teori *supply and demand* ini banyak digunakan oleh para akademisi untuk menganalisis tantangan representasi perempuan di berbagai negara. Dalam ranah politik, teori *supply and demand* yang dikembangkan oleh Joni Lovenduski bersama Pippa Norris dalam karya mereka "*Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament (1995)*" mengkaji proses rekrutmen dan pemilihan kandidat politik dengan memperhatikan dinamika gender, ras, dan kelas sosial. Lovenduski memandang proses seleksi kandidat sebagai mekanisme dinamis dimana terjadi interaksi antara *supply* (calon kandidat) dan *demand* (kebutuhan partai). Partai politik berperan sebagai penentu siapa yang dapat mencalonkan diri, sementara aspirasi personal juga signifikan dalam menentukan hasil akhir. Kesenjangan representasi perempuan sering dijelaskan melalui dua faktor utama: dari sisi *supply* (kurangnya minat atau inisiatif perempuan untuk terjun ke politik) sementara dari sisi *demand* (adanya praktek diskriminatif dari pemilih atau partai politik yang cenderung menghalangi nominasi kandidat perempuan).

1. Supply (Penawaran)

Teori supply dalam menganalisis keterwakilan Perempuan atau posisi publik lainnya dipengaruhi oleh dua faktor krusial. Pertama, ketersediaan (supply) kandidat perempuan ditentukan oleh kepemilikan sumber daya seperti waktu, finansial, dan rekam jejak pengalaman yang dimiliki. Kedua, kesediaan perempuan untuk terlibat dalam kompetisi politik elektoral sangat bergantung pada motivasi personal, ambisi politik, dan ketertarikan mereka terhadap dunia politik praktis. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap potensi kemenangan kandidat yang diusung partai politik dalam pemilihan umum berdasarkan kualifikasi dan keterjangkauan sumber daya yang mereka miliki.

2. Demand (Permintaan)

Dalam konteks analisis demand, penting untuk mengkaji proses seleksi kandidat perempuan di internal partai politik. Pengamatan ini bertujuan mendalami bagaimana proses kandidasi atau rekrutmen politik secara substansial dipengaruhi oleh evaluasi terhadap kapabilitas, kualifikasi, dan latar belakang politisi perempuan saat mereka mengajukan diri sebagai kandidat. Proses penilaian ini sangat dipengaruhi oleh preferensi dan pandangan para elit politik dalam struktur partai, sebagaimana dikemukakan oleh Norris & Lovenduski (1995). Dengan demikian, kualitas kandidat perempuan yang diajukan partai politik untuk kontestasi elektoral sangat ditentukan oleh dinamika mekanisme ini. Pertanyaan krusialnya adalah apakah proses tersebut dilaksanakan dengan prinsip demokratis dan berbasis meritokrasi, atau justru sebaliknya, penentuan kandidat perempuan dilakukan atas dasar relasi klientelisme dan/atau sekadar untuk memenuhi persyaratan kuota perempuan di parlemen yang ditetapkan pemerintah. Kedua jenis mekanisme tersebut baik yang berlandaskan demokratis-meritokratis maupun berbasis klientelisme-pemenuhan kuota memiliki implikasi signifikan terhadap peluang keterpilihan kandidat perempuan dalam kontestasi elektoral.

BAB III

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

A. Partai Demokrat

1. Sejarah Partai Demokrat

Partai Demokrat adalah salah satu partai politik di Indonesia yang didirikan pada 9 Oktober 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itu, SBY terinspirasi dari kekalahannya dalam pemilihan calon wakil presiden pada Sidang MPR tahun 2001. Kekalahan itu justru menjadi momentum refleksi bagi sebagian pihak yang merasa perlu memperjuangkan SBY agar tidak lagi hanya menjadi wakil, melainkan tampil sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan melalui upaya membangun jalur politik mandiri, termasuk melalui pembentukan partai politik. Hasilnya terdapat beberapa orang diantaranya Vence Rumangkang yang menyatakan dukungannya terhadap SBY untuk maju mencalonkan diri sebagai Presiden.

Awal mula pembentukan konsep dasar partai melibatkan Tim Krisna Bambu, dengan Vence Rumangkang memainkan peran kunci dalam aspek administratif. Pada 12 Agustus 2001 pukul 17.00 WIB, SBY memimpin rapat di Apartemen Hilton yang menghasilkan pembentukan tim pelaksana dengan enam anggota yang terdiri dari (1) Vence Rumangkang, (2) Drs. A. Yani Wahid, (3) Achmad Kurnia, (4) Adhiyaksa Dault (5) Baharuddin Tonti, (6) Shirato Syafei. Sembilan hari kemudian, tepatnya 19 Agustus 2001, SBY memimpin pertemuan yang menjadi cikal bakal Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, Vence Rumangkang menegaskan komitmen untuk melanjutkan rencana pendirian partai dan berjanji melaporkan perkembangannya kepada SBY.

Pada 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang berkolaborasi dengan Drs. Sutan Bhatoegana untuk mengumpulkan calon anggota. Mereka membentuk Tim 9 yang sebenarnya terdiri dari 10 orang, bertugas merampungkan konsep pendirian partai politik. Meskipun secara hukum hanya dibutuhkan 50 pendiri, mereka memutuskan mengumpulkan 99 orang - sebuah angka simbolis terkait dengan tanggal lahir SBY (9 September). Pada 9 September 2001, di Gedung Graha Pratama Jakarta Selatan, 46 dari 99 calon pendiri secara resmi

menandatangani akte pendirian Partai Demokrat di hadapan notaris. Sisanya 53 orang memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang.

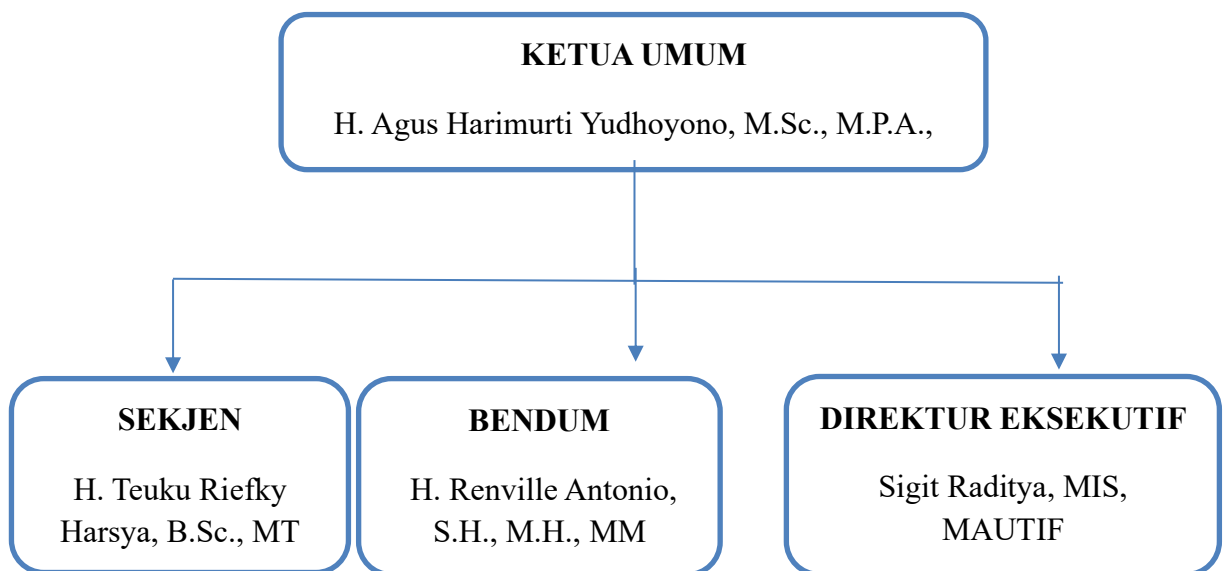
Dalam proses penyusunan kepengurusan, disepakati kriteria spesifik untuk posisi pimpinan. Calon Ketua Umum harus memenuhi tiga kriteria: putra Indonesia asli, lahir di Pulau Jawa, dan beragama Islam. Sementara itu, Calon Sekretaris Jenderal diharapkan berasal dari luar Pulau Jawa dan beragama Kristen. Setelah melakukan penelitian mendalam, Vence Rumangkang mengusulkan dua tokoh penting untuk jabatan strategis. Prof. Dr. Subur Budhisantoso ditunjuk sebagai Pejabat Ketua Umum, sedangkan Prof. Dr. Irsan Tandjung diangkat sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara. Vence Rumangkang sendiri kemudian menduduki posisi Bendahara Umum. Pada malam hari pukul 20.30, Vence Rumangkang menghadap SBY di kediamannya yang saat itu tengah merayakan ulang tahun ke-52. Dalam pertemuan tersebut, Vence memberikan laporan komprehensif tentang proses pembentukan Partai Demokrat. Puncak laporannya adalah rencana pendaftaran partai ke Departemen Kehakiman dan HAM pada keesokan harinya, tepatnya 10 September 2001.

Pada 10 September 2001 pukul 10.00 WIB, enam tokoh penting mengajukan pendaftaran Partai Demokrat ke Departemen Kehakiman dan HAM RI. Delegasi tersebut terdiri dari Vence Rumangkang, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irsan Tandjung, Drs. Sutan Bhatogana MBA, Prof. Dr. Rusli Ramli, dan Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH. Mereka disambut oleh Kepala Subdirektorat Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada 25 September 2001, Menteri Kehakiman dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.MU.06.08.-138 yang secara resmi mendaftarkan dan mengesahkan Partai Demokrat. Dengan keluarnya surat keputusan ini, Partai Demokrat secara sah menjadi salah satu partai politik di Indonesia, dengan proses pendaftaran resmi berlanjut hingga 9 Oktober 2001.

Partai Demokrat secara resmi dideklarasikan dan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama pada 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari seluruh Indonesia. Bersamaan dengan deklarasi tersebut, partai segera menyusun perangkat organisasi dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pada tahun 2001, mereka menerbitkan AD/ART pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun 2003, dilakukan koreksi dan revisi menyeluruh terhadap AD/ART, yang kemudian didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai persyaratan resmi berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat bersifat tetap dan mengikat, dengan ketentuan hanya dapat diubah melalui forum Kongres.

2. Struktur Partai Demokrat



B. DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

1. Sejarah DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kudus memiliki sejarah yang kaya dan berperan penting dalam dinamika politik lokal. Sebagai perpanjangan tangan dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrat Jawa Tengah, DPC Partai Demokrat Kudus mulai membentuk strukturnya seiring dengan kelahiran Partai Demokrat secara nasional pada tahun 2001. Sejak awal berdirinya, DPC Partai Demokrat Kudus berkomitmen untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat lokal. Dengan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan kader-kader yang berpengalaman, partai ini berhasil membangun basis yang

kuat di Kabupaten Kudus. Dalam perjalanannya, DPC Partai Demokrat Kudus telah dipimpin oleh beberapa tokoh yang membawa perubahan dan kemajuan bagi partai.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kudus telah mengalami beberapa periode kepemimpinan yang signifikan, dimulai dari tahun 2007 hingga 2027. Pada periode pertama, DPC dipimpin oleh Drs. Ngatmin Alimanda, yang menjabat selama dua periode hingga tahun 2012. Drs. Ngatmin Alimanda merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus, di bawah kepemimpinannya DPC Partai Demokrat Kudus berhasil membangun fondasi yang kuat dan meningkatkan keterlibatan kader di tingkat lokal. Selama masa kepemimpinannya, Ngatmin Alimanda berfokus pada penguatan struktur organisasi partai dan peningkatan kapasitas kader. Ia menyadari pentingnya kaderisasi dalam memperkuat posisi partai di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Dengan mengadakan berbagai pelatihan dan kegiatan sosial, Ngatmin berusaha untuk menciptakan kader-kader yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu masyarakat.

Ngatmin dikenal sebagai sosok yang aktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat dan memperkenalkan program-program yang relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan popularitas Partai Demokrat di Kabupaten Kudus. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat tetapi juga memperkuat hubungan antara kader dan konstituen. Ngatmin percaya bahwa keberhasilan politik tidak terlepas dari hubungan baik dengan masyarakat. Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2012, Ngatmin tetap aktif dalam dunia politik sebagai anggota Dewan Pembina DPC Partai Demokrat Kudus. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai ketua, kontribusinya dalam pengembangan partai tetap terasa. Ia terus memberikan arahan dan dukungan kepada kader-kader muda yang ingin terjun ke dunia politik. Pengalamannya selama menjabat sebagai ketua menjadi sumber inspirasi bagi banyak kader perempuan yang ingin mengikuti jejaknya.

Setelah Drs. Ngatmin Alimanda, kepemimpinan DPC dilanjutkan oleh Wahyudi dari tahun 2012 hingga 2017. Akan tetapi, Wahyudi selama masa kepemimpinannya disebut sebagai PLT perbantuan setelah setengah periode dari

Drs. Ngatmin Alimanda. Dalam kapasitasnya sebagai PLT, Wahyudi dihadapkan pada tugas untuk menjaga stabilitas organisasi dan memastikan kelangsungan program-program yang telah dirintis oleh pendahulunya. Salah satu fokus utama Wahyudi selama masa jabatannya adalah memperkuat struktur organisasi di tingkat cabang dan meningkatkan keterlibatan kader. Ia menyadari bahwa untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar, penting bagi partai untuk memiliki basis yang solid di tingkat lokal. Oleh karena itu, Wahyudi aktif melakukan rekrutmen kader baru dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kader yang sudah ada. Selama masa kepemimpinannya, Wahyudi berhasil menjaga keberlanjutan program-program yang telah ada sambil menambahkan inovasi baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun menjabat sebagai PLT, ia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mempersiapkan partai untuk menghadapi Pemilu 2024.

Selanjutnya, Edi Kurniawan mengambil alih kepemimpinan DPC Partai Demokrat Kudus tahun 2017 hingga 2022 dan selama periode ini, ia berfokus pada penguatan struktur partai serta peningkatan keterlibatan kader dalam politik. Edi menyadari bahwa untuk meraih keberhasilan dalam pemilu, penting bagi partai untuk memiliki organisasi yang solid dan kader yang terlatih. Oleh karena itu, ia mengimplementasikan berbagai program kaderisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader perempuan serta kader muda lainnya. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Edi adalah memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat kampanye. Dalam era digital ini, Edi Kurniawan mendorong kader untuk aktif di platform-platform online guna menjangkau pemilih muda dan meningkatkan visibilitas partai.

Edi berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Ia mendorong kader perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan partai dan memberikan dukungan penuh bagi mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan adanya program-program pelatihan khusus bagi perempuan, Edi berharap dapat menciptakan lebih banyak pemimpin perempuan di tingkat lokal. Selama masa kepemimpinannya, DPC Partai Demokrat Kudus juga menghadapi tantangan dari dinamika politik lokal, termasuk persaingan ketat dengan partai-partai

lain. Edi Kurniawan berusaha untuk menjaga solidaritas di antara kader dan menghindari perpecahan internal. Ia menyadari bahwa kekompakan dan kerjasama antar kader sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, terutama menjelang Pemilu 2024.

Pada akhir masa kepemimpinannya, Edi Kurniawan berhasil meletakkan dasar yang kuat bagi penerusnya, Mardijanto, yang terpilih pada tahun 2022. Mardijanto melanjutkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Edi, dengan fokus pada penguatan struktur organisasi dan peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan Edi Kurniawan tidak hanya memberikan kontribusi positif selama masa jabatannya tetapi juga memberikan inspirasi bagi kader-kader berikutnya untuk terus berjuang demi kemajuan Partai Demokrat di Kabupaten Kudus. Secara keseluruhan, kepemimpinan Edi Kurniawan di DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus merupakan periode yang penting dalam sejarah partai tersebut. Dengan berbagai inisiatif dan strategi yang diterapkan, ia berhasil meningkatkan keterlibatan kader serta mempersiapkan partai untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Pada tahun 2022, Mardijanto terpilih sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus menggantikan Edi Kurniawan dan ia akan memimpin partai ini hingga 2027. Dalam periode kepemimpinannya, Mardijanto menetapkan target ambisius untuk meraih enam kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus pada Pemilu 2024. Ia menyadari bahwa untuk mencapai target tersebut, perlu adanya penguatan struktur organisasi dan program kerja yang jelas serta terarah. Salah satu fokus utama Mardijanto adalah memperkuat kaderisasi di tingkat lokal. Ia percaya bahwa kader yang terlatih dan memiliki pemahaman politik yang baik adalah kunci untuk memenangkan hati pemilih. Mardijanto berkomitmen untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi kader partai, terutama dalam hal komunikasi politik dan strategi kampanye. Dengan meningkatkan kapasitas kader, ia berharap dapat menciptakan tim yang solid dan siap menghadapi tantangan dalam kontestasi pemilu.

Selama masa kepemimpinannya, Mardijanto juga berencana untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang dijalankan oleh partai. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas strategi yang

diterapkan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan ini, ia berharap dapat memastikan bahwa Partai Demokrat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan pemilih. Dengan berbagai langkah strategis yang diterapkan selama masa kepemimpinannya, Mardijanto berusaha meninggalkan warisan positif bagi penerusnya di DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus. Ia berharap bahwa upaya-upaya yang dilakukan selama masa jabatannya akan memberikan dampak jangka panjang bagi keberhasilan partai di masa depan. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap pelayanan publik, Mardijanto siap membawa Partai Demokrat ke arah yang lebih baik dan lebih kuat di Kabupaten Kudus.

2. Visi dan Misi DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

a. Visi

Selalu menjalankan amanat partai dan menjaga nama baik partai dalam terciptanya solidaritas yang kuat di antara kader partai

b. Misi

1. Melakukan konsolidasi dengan seluruh kader partai untuk menyusun kembali pengurus partai agar tercipta solidaritas diantara kader partai;
2. Mempersiapkan kader-kader partai untuk maju sebagai peserta pemilihan umum sebagai calon legislatif;
3. Meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat dimana masing-masing daerah pemilihan pada pemilihan umum yang akan datang, baik pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
4. Target mempunyai Fraksi sendiri di Lembaga DPRD Kudus
5. Mengevaluasi kembali semua organisasi sayap partai, agar lebih fokus dalam bekerja dan menyerap aspirasi masyarakat;
6. Siap membantu dan mengakomodir program kerja pemerintah baik pusat maupun daerah yang pro rakyat;
7. Membentuk dan memberdayakan peran serta anak-anak muda milenial untuk aktif dalam berorganisasi dan komunitas.

3. Struktur Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus

- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Ketua | : Mardijanto, SE, MH. |
| b. Wakil Ketua | : Imam Sholikin |

- c. Sekretaris : Andrian Fernando, SE
- d. Bendahara : Sumarjono, SH
- e. Direktur Eksekutif Cabang : Santiko, SE

Badan-badan

a. Badan Pemenangan Pemilihan Umum Cabang (BAPPILU-CAB)

- Kepala Badan : Eri Kurniawan, ST, MM
- Wakil Kepala : Sensus Tulistyono
- Sekretaris : wahyu Sakti Ningrum, S.Pd.i
- Anggota : Aprian Pradita Setiawan
Yusrina Irayati
Indarto Yuwono

b. Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Cabang (BPOKK-CAB)

- Kepala Badan : Agus Nisrindo
- Wakil Kepala : Ade Roni Saputra
- Sekretaris : Maftuchah Agustiani
- Anggota : Ratna Dianti
Leli Nofita, SE
Ahmad Syamsudin
Satya Agung Sulistyono
Eko Riyanto

Bidang-Bidang

a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang (BALITBANG-CAB)

- Kepala Bidang : Ahmad Munib, S.Pd.i
- Sekretaris : Mamik
- Anggota : Endang Mustika Ayemsari
Furqoni
Rani Haryanti
Nanik Sugianti
Jumiati

b. Bidang Komunikasi Strategi Daerah (BAKOMSTRA0CAB)

- Kepala Bidang : Rizky Rahmawan
- Sekretaris : Descha Annisya, SE

Anggota	: Bagus Ramandhan
	: Heri Wahyudi
	: Tri Indrayanti
	: Amelia Permata Putri
	: Luthfiah Nawami

c. Bidang Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Cabang (BADIKLAT-CAB)

Kepala Bidang	: Aries Setiawan
Sekretaris	: Ngatirin
Anggota	: Jemhayel
	: Nur Hidayati
	: Siti Fatimatuzzahro
	: Ani Rismawati
	: Indari Putri Melati

d. Bidang Pembinaan Jaringan dan Konstituen Cabang (BPJK-CAB)

Kepala Bidang	: Devi Kasmiya
Sekretaris	: Mochammad Reza Aldino
Anggota	: Jama'ah
	: Asroni
	: Niken Diah Sintawati, A.Md. Keb
	: Utami Nur Indah
	: Eva Kurnia Utama

e. Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang (BPPM-CAB)

Kepala Bidang	: Lisa Octavia Damayanti
Sekretaris	: Widya Ayu Pratiwi
Anggota	: Muhammad Hadi
	: Arief Bachtiar
	: Arum Dyah Linawati
	: Nur Lailatun Nafisah
	: Siti Nuryatin

f. Bidang Hukum dan Pengamanan Partai Cabang (BHPP-CAB)

Kepala Bidang	: Gozjali
Sekretaris	: Riyanto

Anggota : Supriyono
: Malikin
: Auliya Destiana

C. Profil Srikandi Partai Demokrat

1. Sejarah Srikandi Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Srikandi merupakan organisasi khusus perempuan yang berafiliasi menjadi bagian dari struktur keluarga besar partai Demokrat untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan cita-cita perjuangan Partai Demokrat. Sejarah Srikandi tidak terlepas dari upaya Partai Demokrat untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Dalam pidatonya, Annisa Pohan, yang menjabat sebagai Ketua Srikandi, menyatakan bahwa organisasi ini berfungsi sebagai "payung" bagi seluruh perempuan dalam partai. Visi Srikandi adalah menjadi pelopor gerakan perempuan progresif dan inklusif, dengan tujuan menyatukan kekuatan perempuan Demokrat untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih baik. Kehadiran Srikandi juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Meskipun Partai Demokrat telah memiliki sejumlah kader perempuan yang aktif, pembentukan Srikandi diharapkan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dengan adanya platform ini, kader perempuan dapat saling mendukung dan berbagi pengalaman serta pengetahuan mengenai politik

Srikandi di Kabupaten Kudus mulai aktif pada tahun 2019 dan berperan aktif dalam mendukung visi dan misi Partai Demokrat, terutama dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan keterwakilan mereka di politik. Dengan adanya Srikandi, kader perempuan di Kudus mendapatkan platform untuk saling berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan memperkuat kapasitas diri melalui pendidikan politik dan pelatihan keterampilan. Hal ini penting mengingat proporsi keterwakilan perempuan di DPR RI yang masih rendah, yaitu hanya 21,39 persen pada periode 2019-2024.

Srikandi DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus juga berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti bakti sosial dan program-program pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya

meningkatkan visibilitas partai tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap isu-isu yang dihadapi oleh perempuan dan masyarakat secara umum. Ini menciptakan hubungan yang lebih baik antara kader perempuan dengan masyarakat luas. Dalam konteks sejarahnya, Srikandi di Kudus menjadi simbol harapan bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik. Kader-kader perempuan ini tidak hanya berjuang untuk mendapatkan kursi di legislatif tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diperjuangkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan dukungan penuh dari partai, mereka berusaha menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Keberadaan Srikandi diharapkan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat. Dalam perjalanan sejarahnya, Srikandi telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan politik dan sosial di Indonesia. Melalui kolaborasi dan solidaritas, kader perempuan di Kudus berupaya untuk membawa perubahan positif di lingkungan mereka. Dengan semangat yang kuat, Srikandi siap menghadapi tantangan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Harapan besar tertuju pada generasi mendatang agar lebih banyak perempuan yang terlibat aktif dalam politik demi tercapainya kesetaraan gender. Dengan demikian, Srikandi bukan hanya sekadar organisasi, tetapi juga gerakan yang mengedepankan aspirasi perempuan dalam politik.

2. Visi dan Misi Srikandi Partai Demokrat Kabupaten Kudus

a. Visi

Menjadi pelopor gerakan perempuan progresif dan inklusif dengan menyatukan seluruh kekuatan perempuan Demokrat dalam rangka mendukung partai mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

b. Misi

1. Melindungi, memberdayakan, dan memperjuangkan hak kaum perempuan Indonesia;
2. Mengayomi seluruh perempuan Demokrat dari berbagai elemen organisasi dalam semangat kekeluargaan;

3. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan Demokrat melalui pendidikan politik dan pelatihan keterampilan yang relevan;
4. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai kalangan dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi di bidang sosial dan kemanusiaan.

3. Struktur DPC Srikandi Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Penasehat	1. Aminah 2. Lilik N Wohon
Ketua	1. Ayu Cahya Widianingrum S.H
Wakil Ketua	1. Devi Kasmiya S.S
Sekretaris	1. Ketua : Novia Amalina Vicly dipl. CIDESCO 2. Wakil : Merita Putri Septia S.IP
Seksi Organisasi	1. Ketua : Fifin Rianawati 2. Wakil : Maftuchah Agustiani
Seksi Hukum dan HAM	1. Ketua : Siska Margareta
Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Ketua : Indari Puteri Melati
Seksi Pendidikan, Penelitian, Pelatihan, dan Pengembangan	1. Ketua : Najwa Eka Gusna Putri
Seksi Koperasi	1. Ketua : Laila Azzahro A.Md
Seksi Usaha Kecil dan Menengah	1. Ketua : Diah Putri Wahyuningtyas
Seksi Sosial dan Kemasyarakatan	1. Ketua : Impuni Ningsih
Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1. Ketua : Eva Chorida Amalia

Seksi Kerohanian	1. Ketua : Mamik
-------------------------	------------------

Tabel 3.1 Struktur Pengurus Srikandi Partai Demokrat Kabupaten Kudus

Sumber: *Hasil Wawancara Ayu*

BAB IV

POLA KADERISASI PEREMPUAN DALAM PARTAI DEMOKRAT DI KABUPATEN KUDUS

A. Proses kaderisasi perempuan

1. Rekrutmen perempuan

Proses kaderisasi merupakan aspek fundamental dalam membangun keberlangsungan dan kemajuan sebuah organisasi karena melalui proses ini, nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan kepemimpinan dapat ditransfer secara sistematis kepada generasi penerus. Tanpa adanya sistem kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan, organisasi akan menghadapi kesulitan serius dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan calon pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang diperlukan untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuannya di masa depan. Ketiadaan proses kaderisasi yang baik dapat mengakibatkan kekosongan kepemimpinan, penurunan kualitas manajemen, hingga ketidakmampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang semakin kompleks (Partanto & Al Barry, 1994). Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sistem kaderisasi yang efektif menjadi kunci strategis bagi organisasi untuk memastikan ketersediaan pemimpin berkualitas yang mampu meneruskan dan mengembangkan visi organisasi secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, Partai Demokrat di Kabupaten Kudus menghadapi tantangan yang signifikan terutama dalam konteks rekrutmen perempuan yang masih bersifat kekeluargaan dan belum terstruktur. Dalam konteks ini, banyak kader perempuan yang direkrut melalui hubungan personal dan jaringan sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini sering kali menciptakan lingkungan yang lebih akrab dan mendukung, tetapi juga dapat membatasi kesempatan bagi perempuan yang tidak memiliki koneksi kuat dalam jaringan tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada potensi untuk meningkatkan partisipasi perempuan, proses rekrutmen ini sering kali terjebak dalam pola yang tidak formal dan tidak transparan.

Rekrutmen kader perempuan di Partai Demokrat Kabupaten Kudus sering kali dilakukan melalui kedekatan personal, di mana anggota partai yang sudah ada merekomendasikan teman atau kerabat mereka untuk bergabung. Proses ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara kader baru dan partai, tetapi juga dapat

menyebabkan kurangnya objektivitas dalam pemilihan calon. Kader perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan pengurus partai mungkin lebih mudah mendapatkan posisi atau rekomendasi sebagai calon legislatif dibandingkan dengan mereka yang lebih kompeten tetapi tidak memiliki koneksi serupa. Selain itu, banyak kader perempuan yang berasal dari latar belakang politisi atau pengurus partai, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam politik. Hal ini menciptakan situasi di mana perempuan merasa didukung oleh keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun, fenomena ini juga dapat menciptakan kesan bahwa keterlibatan mereka lebih didasarkan pada hubungan keluarga daripada kompetensi atau kemampuan politik yang sebenarnya.

“Saya masuk Partai Demokrat itu dari tahun 2019 kalau sampai sekarang sudah 5 tahun-an ikut partai. Saya ikut partai Demokrat awalnya dari bisnis ya, dari bisnis terus saya pengen merambah ke politik. dari situ kan saya pengennya kaya pengen tau gimana sih politik itu? Organisasi itu seperti apa? Partai itu gimana? Kalau untuk recruitment sendiri nggak ada yang resmi, jadi saya sendiri juga diajak Mbak Ayu yg kebetulan dia teman sekolah saya dan juga ketua srikandi saat ini “ayo ikut partai yuk” terus aku gini “emang ngapain aja kegiatannya kalau ikut partai” nanti kalau semisal ada kegiatan sosial kita ikut ataupun biasanya ngadain kaya pelatihan untuk wanita-wanita yang ibaratnya dari yang nggak kerja ataupun kerjanya serabutan, nanti bisa kita kasih penyuluhan atau pelatihan. (Wawancara Novia, 6 Januari 2025)

Pola rekrutmen yang bersifat kekeluargaan ini memiliki beberapa dampak signifikan terhadap kualitas kaderisasi. Di satu sisi, pendekatan informal ini dapat memudahkan proses masuknya perempuan ke dalam partai karena adanya rasa nyaman dan kepercayaan yang terbangun melalui hubungan personal. Namun di sisi lain, hal ini dapat mengakibatkan tidak meratanya kesempatan bagi perempuan lain yang mungkin memiliki potensi dan kompetensi yang lebih baik namun tidak memiliki akses ke jaringan internal partai. Politik kekeluargaan menjadi salah satu faktor dominan dalam proses rekrutmen di Partai Demokrat. Banyak perempuan yang dicalonkan adalah istri atau anak dari pejabat partai sebelumnya, sehingga mengarah pada pengulangan pola yang sama dalam pengisian posisi politik.

“Menurut saya sendiri kalau kaderisasi Perempuan disini itu lebih ke kaderisasi informal ya, seperti saya juga masuk kan melalui keterkenalan anggota terus diajak ikut ke partai Demokrat seperti itu, kalau dari saya pribadi kaderisasi

informal malah mungkin lebih bisa diterapin mulai dari orang-orang terdekat. Kadang kalau sekalipun kita ngobrol dengan orang lain kan belum tentu juga orang itu tertarik masuk partai atau tidak, malah kadang yang lebih menjadi faktor keberhasilan kaderisasi ya kaderisasi informal itu tadi. Setau saya kalau di Partai Demokrat hampir kebanyakan menerapkan kaderisasi informal.” (Wawancara Novia, 6 Januari 2025)

Ketiadaan struktur yang jelas dalam proses kaderisasi juga berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas kader perempuan. Tanpa adanya kurikulum yang terstandar dan program pengembangan yang sistematis, proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas kader perempuan menjadi tidak terarah. Akibatnya, kader perempuan mungkin tidak mendapatkan bekal yang cukup dalam hal pengetahuan politik, kemampuan kepemimpinan, dan keterampilan organisasi yang dibutuhkan untuk berkiprah dalam dunia politik. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi regenerasi kepemimpinan dalam partai. Ketika proses rekrutmen dan kaderisasi tidak terstruktur dengan baik, sulit untuk memastikan adanya estafet kepemimpinan yang berkualitas. Kader perempuan yang masuk melalui jalur kekeluargaan mungkin tidak memiliki visi yang jelas tentang pengembangan partai dan pemahaman mendalam tentang ideologi serta platform partai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan mereka di masa depan.

Menurut Veithzal Rivai (2003: 82-86) kaderisasi yang baik memiliki dua hal yaitu, kaderisasi formal dan informal. Namun, dalam pelaksanaan kaderisasi perempuan di Partai ini belum ada rekrutmen formal yang berjalan. Hal ini dikarenakan belum terdapat sistem kaderisasi formal yang diterapkan oleh pengurus partai untuk rekrutmen kader perempuan. Padahal kaderisasi formal yang berkaitan dengan rekrutmen sangat penting bagi keberlangsungan partai politik karena pendidikan kader yang terstruktur akan membentuk karakter dan sebagai bekal menjadi kader yang berkualitas. Memang rekrutmen formal membutuhkan prosedur yang terorganisir dan terlembaga serta SDM yang fokus menjadi penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen formal. Namun hal inilah yang belum dimiliki Partai Demokrat, sebab SDM di Partai Demokrat masih sangat minim untuk mengurus aspek rekrutmen perempuan secara terlembaga.

Sehingga Partai Demokrat lebih berfokus pada rekrutmen informal yang dimulai dari jejeraing kekerabatan kader partai yang di dasarkan pada membangun kedekatan personal. Secara keseluruhan, pola rekrutmen kader perempuan di Partai Demokrat

Kabupaten Kudus melalui kedekatan dan kekeluargaan menciptakan dinamika yang kompleks. Meskipun pendekatan ini dapat memperkuat solidaritas di antara anggota partai, ia juga membawa tantangan tersendiri terkait kualitas dan keberagaman kaderisasi. Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan secara efektif, penting bagi Partai Demokrat untuk mengembangkan mekanisme rekrutmen yang lebih transparan dan objektif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua perempuan tanpa memandang latar belakang sosial atau kekeluargaan.

Dengan demikian, partai dapat memastikan bahwa semua kader perempuan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara maksimal dalam politik. Sehingga dapat memastikan proses kaderisasi yang adil, artinya menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk terlibat dan berkembang dalam karier politik, tanpa membedakan ras, kelompok, agama, gender, atau suku (Syamsudin, 2026: 52).

2. Pelatihan dan Pembinaan

Kaderisasi dalam partai politik pada dasarnya merupakan proses bagi anggota dan pengurus partai untuk memperoleh pendidikan politik terkait visi, misi, ideologi, serta nilai-nilai yang dianut oleh partai tersebut (Veithzal Rivai, 2003: 82). Sejalan dengan itu, Partai Demokrat membangun pendidikan kader yang bersifat formal dan non formal untuk anggota perempuan yang bersifat terbuka. Prinsip keterbukaan ini menegaskan bahwa proses pembinaan kader harus tersedia bagi seluruh anggota partai politik. Tujuannya adalah untuk menjamin setiap anggota mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti pelatihan dan kegiatan pengembangan kader (Syamsudin, 2016: 52). Lebih lanjut lagi kaderisasi perempuan pada Partai Demokrat ini menggunakan model kaderisasi untuk anggota partainya saja. Harapannya para anggota yang sudah tergabung dapat menjadi kader yang selaras dengan visi dan misi partai.

Peneliti membagi menjadi 3 (tiga) bagian berkaitan dengan pelaksanaan kaderisasi perempuan di Partai Demokrat Kab. Kudus, sebagai berikut:

a. Pemahaman Kepartaian dan Pemerintahan

Pelatihan dan pembinaan kader perempuan di Partai Demokrat yang masih didominasi kegiatan arisan dan anjangsana-anjangsini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengembangan kapasitas politik perempuan. Meskipun kegiatan ini dapat meningkatkan solidaritas antar anggota, mereka sering kali tidak

memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemerintahan dan politik. Kegiatan arisan dan anjongsana di Partai Demokrat lebih berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar kader perempuan daripada sebagai platform pendidikan politik. Meskipun interaksi sosial ini penting untuk membangun jaringan, mereka tidak menggantikan kebutuhan akan pelatihan formal yang dapat meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan dan mekanisme legislatif. Akibatnya, banyak kader perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk berkontribusi secara efektif dalam pengambilan keputusan politik.

"Jadi kegiatan ini sudah ada sejak awal terbentuknya srikandi yang pada waktu itu diketuai oleh Ibu Aminah. Pada mulanya memang informal saja, beberapa pengurus perempuan berkumpul dan mengadakan arisan bulanan. Lama-lama anggotanya bertambah dan kita mulai rutin mengadakan kunjungan ke rumah anggota secara bergiliran. Tujuan utamanya untuk mempererat silaturahmi antar kader perempuan." (Wawancara Ayu, 16 Desember 2024)

"Kalau pembahasan politik formal jarang ya. Lebih banyak obrolan santai tentang kondisi di lingkungan masing-masing. Misalnya ada masalah di kelurahan apa, warga yang perlu bantuan, atau info-info kegiatan sosial. Tapi memang belum ada kurikulum atau materi khusus yang dibahas." (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

Kegiatan arisan dan anjongsana di Partai Demokrat memiliki peran penting dalam membangun solidaritas dan kekompakan antar anggota, terutama di kalangan kader perempuan. Melalui arisan, anggota dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan mendiskusikan isu-isu yang relevan dengan politik dan pemerintahan, meskipun fokus utama kegiatan ini lebih kepada aspek sosial. Arisan dalam konteks Partai Demokrat tidak hanya berfungsi sebagai ajang pengumpulan dana, tetapi juga sebagai forum untuk membangun komunikasi antar anggota. Dalam suasana yang santai dan akrab, kader perempuan dapat berbagi cerita dan pengalaman mereka dalam berpolitik. Hal ini membantu menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung di antara anggota, yang sangat penting dalam dunia politik yang sering kali kompetitif. Namun, meskipun kegiatan ini membawa manfaat sosial, sering kali kurang memberikan pengetahuan mendalam tentang strategi politik atau kebijakan publik.

Selain arisan, kegiatan anjangsana juga menjadi bagian penting dari interaksi antar kader. Anjangsana biasanya dilakukan dengan mengunjungi satu sama lain atau mengadakan pertemuan di lokasi tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan memperdalam hubungan antar anggota partai. Dalam konteks ini, anjangsana dapat menjadi kesempatan bagi kader untuk mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam politik serta mencari solusi bersama. Namun, seperti halnya arisan, kegiatan ini sering kali tidak terfokus pada pembelajaran formal tentang pemerintahan.

“Biasanya kita mulai dengan arisan dulu, lalu sharing-sharing tentang kegiatan partai, kondisi di wilayah masing-masing. Kadang juga ada yang curhat soal kendala di lapangan. Setelah itu biasanya ada acara makan bersama. Sese kali kita juga mengundang pengurus DPC untuk memberikan arahan atau informasi terbaru dari partai. Sejauh ini anggota senang karena formatnya santai dan kekeluargaan. Mereka jadi lebih akrab satu sama lain. Tapi memang ada beberapa yang usul supaya ada tambahan kegiatan yang lebih substantif seperti pelatihan public speaking atau pemahaman tentang tugas-tugas di legislatif.” (Wawancara Ayu, 16 Desember 2024).

Meskipun kegiatan arisan dan anjangsana memiliki nilai positif dalam membangun hubungan sosial, terdapat keterbatasan signifikan dalam hal pendidikan politik bagi kader perempuan. Banyak anggota yang terlibat dalam kegiatan ini mungkin tidak mendapatkan pelatihan formal atau pemahaman yang cukup tentang mekanisme pemerintahan dan kebijakan publik. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kesiapan kader perempuan untuk menghadapi tantangan politik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting bagi Partai Demokrat untuk menyeimbangkan antara kegiatan sosial dengan program pelatihan yang lebih terstruktur.

“Sebenarnya kegiatan seperti ini bagus untuk membangun kedekatan personal. Tapi memang perlu ditambah dengan program pengembangan kapasitas yang lebih terstruktur. Misalnya workshop atau seminar tentang isu-isu perempuan, pelatihan kepemimpinan, atau studi banding ke daerah lain. Jadi tidak hanya sebatas kumpul-kumpul saja.” (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

Kaderisasi perempuan di Partai Demokrat masih dilakukan secara terbatas dan belum mendapat perhatian yang optimal. Program kaderisasi yang ada cenderung

belum terstruktur dengan baik, sehingga partisipasi dan pengembangan kapasitas perempuan dalam politik masih belum maksimal. Kurangnya pendekatan yang sistematis dalam kaderisasi ini membuat perempuan di dalam partai memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan politik yang lebih mendalam. Namun, meskipun belum berjalan secara optimal, proses kaderisasi ini tetap memberikan manfaat, terutama sebagai sarana transfer pengetahuan (Jamri, 2018: 17). Dalam berbagai kesempatan, anggota perempuan dapat saling berbagi wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai politik serta peran mereka di dalam partai. Dengan adanya interaksi ini, kaderisasi tetap berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman politik perempuan, meskipun masih perlu penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

b. Ekonomi Keluarga

Pelatihan dan pembinaan kader perempuan di Partai Demokrat dalam konteks ekonomi keluarga menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pemberdayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader perempuan agar dapat berkontribusi secara aktif dalam perekonomian lokal. Pelatihan dan pembinaan kader perempuan di Partai Demokrat dalam hal ekonomi keluarga berfokus pada pengembangan usaha bersama melalui jaringan internal partai. Menurut Muhammad (2016: 110-120) dalam ruang lingkup partai politik, kader merupakan afiliasi partai politik yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga tidak hanya intervensi partai politik terhadap individu atau calon anggota untuk membantu mereka menjadi lebih baik dan lebih mampu melaksanakan peran dan fungsi partai. Akan tetapi juga membantu aspek material melalui ruang-ruang pengembangan partai. Tentunya dengan harapan bisa menjadi kader yang mandiri dan mampu berjuang sesuai dengan visi misi partai tersebut.

Kemudian dalam konteks ini, Partai Demokrat memiliki skema sederhana dimana kader yang memiliki usaha saling mendukung dengan membentuk jejaring bisnis informal, yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi sumber daya dan informasi. Misalnya, kader yang memiliki usaha katering dapat diutamakan untuk menangani konsumsi pada acara-acara partai, sedangkan kader dengan usaha percetakan dapat dipercaya untuk mencetak atribut dan materi kampanye. Hal ini tidak hanya memperkuat solidaritas antar kader, tetapi juga meningkatkan daya saing usaha mereka.

Jaringan bisnis informal di antara kader perempuan Partai Demokrat memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi kekeluargaan. Dengan saling mendukung, para kader dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing untuk menciptakan peluang usaha yang lebih besar. Misalnya, kader yang memiliki keterampilan dalam bidang kuliner dapat bekerja sama dengan kader yang ahli dalam pemasaran untuk mempromosikan produk mereka secara lebih efektif. Jaringan ini juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha kecil, di mana anggota dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan berbagi strategi sukses.

"Awalnya dari obrolan santai saja waktu kumpul pengurus. Kita lihat banyak kader yang punya usaha sendiri-sendiri. Ada yang katering, percetakan, konveksi. Daripada cari vendor luar, kenapa tidak memanfaatkan potensi internal? Kita tidak ada sistem tender formal. Biasanya bergiliran supaya merata. Tapi tetap lihat kapasitas dan kualitas kerja. Kalau acaranya besar seperti Musda atau kampanye, kadang kita bagi ke beberapa vendor supaya semua kebagian. Yang penting harga tetap masuk akal dan kualitasnya terjaga." (Wawancara Novia, 6 Januari 2025)

Salah satu bentuk dukungan nyata bagi kader perempuan adalah memberikan prioritas kepada mereka dalam menangani kebutuhan acara partai. Misalnya, ketika ada acara resmi partai yang memerlukan konsumsi, kader dengan usaha katering akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menyediakan layanan tersebut. Ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi mereka tetapi juga meningkatkan visibilitas usaha mereka di kalangan anggota partai dan masyarakat umum. Dengan demikian, dukungan ini membantu memperkuat posisi para kader sebagai pelaku ekonomi di lingkungan mereka.

Untuk memastikan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh kader perempuan, Partai Demokrat juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha tersebut. Melalui forum diskusi atau pertemuan rutin, para kader dapat berbagi tantangan yang dihadapi serta solusi yang telah diterapkan. Selain itu, partai dapat membantu menghubungkan kader dengan sumber daya eksternal seperti lembaga keuangan atau organisasi non-pemerintah yang menyediakan bantuan teknis dan modal. Dengan cara ini, diharapkan para kader perempuan tidak hanya mampu bertahan dalam menjalankan usaha tetapi juga berkembang menjadi wirausaha yang sukses. Secara keseluruhan, pelatihan dan pembinaan kader perempuan di Partai

Demokrat dalam hal ekonomi kekeluargaan melalui jaringan internal partai memberikan banyak manfaat. Dengan saling mendukung dan membentuk jejaring bisnis informal, para kader dapat mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif. Program pelatihan keterampilan serta dukungan dalam acara partai menjadi langkah strategis untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kontribusi mereka dalam perekonomian lokal.

c. Sosial Kemasyarakatan

Pelatihan dan pembinaan kader perempuan Partai Demokrat di Kabupaten Kudus dalam bidang sosial kemasyarakatan merupakan salah satu fokus penting dalam mengembangkan kepekaan sosial dan kemampuan tanggap bencana para kader. Menurut Budiardjo (1993) partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir dengan anggota-anggota yang memiliki orientasi, nilai, dan tujuan yang sama. Tentu sebagai salah satu kelompok sosial politik yang memiliki tujuan mendapatkan kekuasaan politik dan menduduki jabatan politik. Kader-kadernya perlu disiapkan untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap lingkungan. Selain membantu masyarakat, secara tidak langsung juga membantu mempromosikan partai ini. Dengan anggapan bahwa partai ini dekat dan memperhatikan masyarakat, ini bisa menjadi poin penting saat kontestasi pemilu.

Dalam program sosial kemasyarakatan ini umumnya melibatkan serangkaian pelatihan dasar tentang penanganan situasi darurat, koordinasi bantuan sosial, dan pengembangan jaringan komunitas. Meski demikian, pelaksanaannya seringkali masih bersifat reaktif dan belum memiliki kurikulum yang terstruktur dengan baik. Melalui pelatihan ini, mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengorganisir bantuan dan mendukung pemulihan masyarakat.

"Kalau bencana atau kejadian mendadak, biasanya kami langsung bergerak by phone. Koordinator wilayah menghubungi kader-kader untuk mengumpulkan bantuan. Memang tidak ada SOP khusus, lebih ke spontanitas dan gotong royong. Yang penting quick response dulu, baru nanti dipikirkan teknisnya." (Wawancara Ayu, 16 Desember 2024)

"Koordinasi sering jadi masalah karena tidak ada sistem yang jelas. Kadang bantuan menumpuk di satu tempat, tempat lain malah kurang. Data korban juga sering tidak akurat karena tidak ada format standar. Belum lagi masalah

pendanaan yang harus dikumpulkan mendadak." (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

Aspek penting lainnya dalam pembinaan sosial kemasyarakatan adalah pengembangan kemampuan kader perempuan dalam membangun dan mengelola jaringan sosial. Para kader dilatih untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci di masyarakat, membangun komunikasi efektif dengan berbagai kelompok sosial, dan mengorganisir kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, pendekatan yang digunakan masih cenderung tradisional dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Menurut Putnam (2000), jaringan sosial merupakan elemen penting dalam pembangunan modal sosial yang berkontribusi terhadap keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kolektif. Jaringan sosial yang kuat memungkinkan adanya koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif dalam komunitas. Dalam konteks kader perempuan, penguatan jaringan sosial dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan sosial serta meningkatkan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan.

"Biasanya yang tinggal dekat lokasi langsung jadi koordinator lapangan. Yang lain bantu sesuai kemampuan. Ada yang fokus di dapur umum, ada yang bagian pendataan, ada yang urusan logistik. Pembagian peran lebih ke spontanitas, tidak ada struktur khusus. Sebenarnya kami butuh pelatihan yang terstruktur. Misalnya cara assessment kebutuhan yang tepat, teknik evakuasi, atau pertolongan pertama. Juga perlu ada panduan standar untuk koordinasi dan pelaporan." (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

Untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan sosial kemasyarakatan ini, Partai Demokrat perlu mengembangkan sistem pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Ini mencakup penyusunan kurikulum standar, pengembangan modul pelatihan yang terstruktur, dan pembentukan tim khusus yang fokus pada pengembangan kapasitas kader perempuan dalam bidang sosial. Dengan demikian, kader perempuan tidak hanya mampu memberikan bantuan yang bersifat reaktif, tetapi juga dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat jangka panjang. Dalam aspek sosial kemasyarakatan ini juga merespon aspirasi berbagai keluhan masyarakat melalui kader-kader perempuan di desa berkaitan dengan program sosial pemerintah atau keluhan fasilitas publik.

3. Diaspora Kader

a. Diaspora kader menuju struktural

Proses diaspora kader perempuan menuju struktural di Partai Demokrat mencerminkan dinamika yang kompleks dalam sistem kaderisasi partai politik di Indonesia. Perjalanan kader perempuan untuk mencapai posisi struktural seringkali dimulai dari keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan di tingkat akar rumput. Pada tahap awal ini, mereka umumnya bergabung melalui jalur informal seperti arisan, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya yang diorganisir oleh partai. Fase awal ini menjadi pintu masuk yang paling umum karena sifatnya yang lebih cair dan tidak menuntut pemahaman politik yang mendalam. Setelah bergabung dalam kegiatan informal, kader perempuan kemudian mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas partai yang lebih terstruktur. Mereka dituntut untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas melalui keaktifan dalam menghadiri rapat-rapat partai, menjadi panitia dalam berbagai kegiatan, dan berkontribusi dalam program-program sosial. Tahap ini menjadi semacam masa pengujian dimana senior-senior partai mengamati kinerja dan potensi mereka, meski belum ada sistem penilaian yang terstandar.

“Awal mulanya saya bisa sampai di posisi ini karena saya aktif di berbagai kegiatan perempuan-perempuan di Partai Demokrat, mulai dari arisan, anjongsana-anjangsini, pengajian. Mulai dari situ, beberapa tahun kemudian saya mulai sering diminta bantu-bantu acara partai dan juga ikut koordinasi rapat juga sampai ke luar kota. Dari situ pelan-pelan saya dipercaya menjadi ketua ranting PAC.” (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)



Gambar 4.1 Muscab Partai Demokrat Kab. Kudus

Sumber: *Hasil wawancara Mamik*

Di Partai Demokrat, proses kader perempuan menuju struktural kepengurusan merupakan perjalanan yang membutuhkan waktu dan pembuktian diri. Krook & Childs (2010) menjelaskan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam partai politik meningkat, mereka masih menghadapi hambatan struktural seperti minimnya akses ke sumber daya politik dan kecenderungan partai untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam posisi kepemimpinan. Dalam tahap awal setelah masuk struktur, kader perempuan biasanya ditempatkan di posisi-posisi yang masih terbatas ruang geraknya, seperti sekretaris bidang, wakil bendahara, atau koordinator program sosial. Penempatan ini seringkali dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi kader untuk memahami mekanisme kerja partai secara lebih mendalam.

Agar bisa mendapatkan posisi yang lebih strategis, kader perempuan harus mampu menunjukkan keberhasilan dalam mengelola program-program yang dipercayakan. Ini termasuk kemampuan dalam mengorganisir kegiatan, mengelola anggaran, membangun jaringan dengan konstituen, dan berkontribusi dalam pencapaian target partai. Proses pembuktian ini bisa memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan konsistensi serta ketahanan mental yang kuat, mengingat masih adanya skeptisisme terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik.

Perjalanan menuju struktural kemudian berlanjut dengan proses pembelajaran informal tentang mekanisme kerja partai. Kader perempuan yang menunjukkan potensi biasanya mulai diberi tanggung jawab lebih besar, seperti menjadi koordinator wilayah atau penanggung jawab program tertentu. Namun, proses ini seringkali tidak merata dan sangat bergantung pada penilaian subjektif pengurus yang ada, serta dipengaruhi oleh faktor kedekatan personal dengan tokoh-tokoh berpengaruh di partai. Tahap kritis dalam proses menuju struktural terjadi ketika ada momentum reorganisasi atau pergantian kepengurusan. Pada fase ini, kader perempuan yang telah menunjukkan dedikasi dan memiliki jaringan yang kuat di internal partai memiliki peluang untuk dimasukkan dalam struktur. Namun, seringkali penempatan posisi masih dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis dan faktor kedekatan dengan pengambil keputusan, bukan semata-mata berdasarkan kapasitas dan kinerja.

“Menurut saya tahap kritis dalam proses menuju struktural dengan cara membangun dukungan di internal partai yaitu, kuncinya networking dan track record. Saya aktif di berbagai kegiatan, tidak hanya yang khusus perempuan saya. Juga penting membangun kedekatan dengan senior-senior partai. Mereka yang nantinya akan merekomendasikan kita saat ada pergantian pengurus.” (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)



Gambar 4.2 Muscab Partai Demokrat Kab. Kudus

Sumber: Hasil wawancara Mamik

Faktor penting lainnya dalam proses menuju posisi struktural yang lebih tinggi adalah kemampuan membangun koalisi internal. Kader perempuan perlu membangun dukungan dari berbagai kelompok dalam partai, termasuk senior-senior partai, kelompok basis massa, dan sesama kader perempuan. Kemampuan bernegosiasi dan membangun konsensus menjadi kunci untuk mendapatkan dukungan saat ada kesempatan promosi atau reorganisasi kepengurusan. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan eksistensi dan pengaruh dalam struktur partai. Kader perempuan yang telah mencapai posisi strategis dituntut untuk terus berinovasi dan menghasilkan terobosan-terobosan dalam program partai. Mereka juga harus mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat, termasuk dalam situasi-situasi kritis seperti penanganan konflik internal atau menghadapi persaingan politik. Kemampuan untuk konsisten memberikan kontribusi positif dan mempertahankan dukungan basis menjadi faktor penentu keberlanjutan karir mereka dalam struktur partai.

“Sejauh ini faktor kedekatan dengan tokoh masih sangat berpengaruh, tapi bukan berarti hanya mengandalkan itu. Kedekatan dengan tokoh penting memang membuka pintu, tapi kita tetap harus membuktikan kapasitas untuk bisa bertahan dan naik level. Kita juga dituntut harus terus produktif, punya program yang berdampak. Saya selalu berusaha membawa inovasi, seperti program pemberdayaan ekonomi untuk kader perempuan dan yang paling penting jangan diam di zona nyaman.” (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

a. Diaspora kader dalam kontestasi pemilu 2024

Proses diaspora kader perempuan di Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Partai Demokrat sebagai wadah dari kader-kader perempuan mendukung penuh kadernya untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024. Dalam tahap ini, partai menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dan mendorong kader untuk berani mencalonkan diri, mengingat adanya regulasi yang mewajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam setiap daftar calon legislatif. Dalam konteks ini, kader perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif harus melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terencana. Proses ini tidak hanya melibatkan penguatan kapasitas individu, tetapi juga integrasi mereka ke dalam struktur organisasi partai yang lebih besar, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan politik.

Partai Demokrat memiliki mekanisme untuk menilai kelayakan kader perempuan yang ingin maju dalam kontestasi pemilu. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada popularitas atau koneksi politik, tetapi juga pada integritas, komitmen terhadap partai, dan kemampuan untuk mewakili aspirasi masyarakat. Mereka umumnya memulai dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti pendampingan komunitas, advokasi sosial, atau kegiatan pemberdayaan perempuan. Kader perempuan diharapkan menunjukkan kinerja yang baik dalam kegiatan partai dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik dan sosial. Momen-momen ini menjadi titik penting untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan struktural partai, di mana setiap kader perempuan harus mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan kedekatan dengan konstituennya.

"Kami tidak sekadar mencari perempuan yang memiliki nama atau status, tetapi mereka yang benar-benar memahami visi partai dan memiliki

kemampuan membangun komunikasi efektif dengan konstituennya," (Wawancara Fernando, 9 November 2024)

Meskipun Partai Demokrat berkomitmen untuk mendukung kader perempuan, banyak dari mereka masih merasa kurang mendapatkan dukungan yang memadai dari internal partai. Dukungan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan mereka menghadapi dunia politik yang kompetitif. Selain itu, dukungan dari lingkungan eksternal, seperti keluarga dan masyarakat juga berperan penting. Banyak kader perempuan yang harus berjuang melawan pandangan negatif dari orang-orang di sekitar mereka yang meragukan kemampuan mereka untuk terlibat dalam politik. Hal tersebut membuktikan bahwa jaringan sosial juga memainkan peran penting dalam proses diaspora kader perempuan di Partai Demokrat. Jaringan ini membantu mereka membangun kepercayaan diri dan memperluas koneksi politik yang diperlukan untuk maju sebagai calon legislatif.

"Dukungan dari internal partai menurut saya masih minim, Struktur partai masih didominasi laki-laki. Sistem kaderisasi belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk maju." (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

Terlepas dari tantangan gender kader perempuan dalam Partai Demokrat sering kali juga harus bersaing dengan kader laki-laki yang memiliki latar belakang politik yang lebih kuat atau koneksi yang lebih luas. Kader perempuan harus mampu melewati tantangan struktural yang kerap kali bersifat maskulin dan kompetitif. Meskipun ada kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, implementasinya sering kali tidak konsisten. Dalam banyak kasus, kader laki-laki dengan pengalaman politik lebih banyak atau dukungan keluarga yang kuat lebih diutamakan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kesempatan bagi kader perempuan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon legislatif. Mereka tidak hanya dituntut untuk memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga jejaring politik yang solid. Proses pendekatan dengan pengurus partai di berbagai level, mulai dari cabang hingga pusat, menjadi strategi penting untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan.

"Tantangan terbesarnya adalah melawan stigma masyarakat yang meragukan kemampuan perempuan di ranah politik. Saya harus ekstra keras membuktikan kompetensi, menunjukkan kemampuan lebih dari sekadar memenuhi kuota 30%." (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

Setelah melalui proses penilaian, kader perempuan sering kali menerima umpan balik tentang kinerja mereka dalam partai. Umpan balik ini bisa berupa kritik konstruktif atau pujian atas kontribusi mereka. Namun, tidak jarang umpan balik ini datang dengan penilaian yang keras, terutama jika mereka dianggap tidak memenuhi standar tertentu. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi kader perempuan yang berusaha keras untuk membuktikan diri di tengah stigma dan tantangan lainnya.

Tahap akhir yang krusial adalah proses seleksi internal yang ketat dan kompetitif. Setiap kader perempuan harus melalui serangkaian uji kelayakan, mulai dari penilaian kapasitas kepemimpinan, track record aktivisme, hingga kemampuan mereka untuk berkompetisi dalam arena pemilihan legislatif. Rekomendasi pencalonan bukan sekadar pemberian, melainkan penghargaan atas perjuangan dan dedikasi seorang kader dalam mengawal dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam struktur Partai Demokrat. Dengan upaya bersama dari partai dan para kader, diharapkan lebih banyak perempuan dapat terlibat aktif dalam politik dan berkontribusi pada pengambilan keputusan di tingkat legislatif.

b. Diaspora kader bidang ekonomi

Diaspora kader dalam bidang ekonomi di Partai Demokrat menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Proses ini melibatkan kader perempuan yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dan nasional. Dengan memanfaatkan jaringan yang ada, kader perempuan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Melalui pendekatan ini, Partai Demokrat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Partai Demokrat berusaha menarik kader perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang ekonomi, bisnis, atau kewirausahaan.

Salah satu aspek penting dari diaspora kader adalah pembangunan jaringan bisnis antar anggota partai. Kader perempuan didorong untuk saling mendukung melalui kolaborasi dalam berbagai proyek usaha. Misalnya, kader yang memiliki usaha kuliner dapat bekerja sama dengan kader yang bergerak di bidang pemasaran untuk mempromosikan produk mereka secara lebih luas. Jaringan ini tidak hanya memperkuat solidaritas antar kader tetapi juga menciptakan peluang baru bagi

pengembangan usaha mereka. Dengan adanya dukungan dari sesama kader, mereka dapat lebih mudah mengatasi tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis. Partai Demokrat juga berperan aktif dalam membantu pemasaran produk yang dihasilkan oleh kader perempuan. Melalui kegiatan bazar atau pasar murah, partai memberikan platform bagi kader untuk mempromosikan produk mereka kepada masyarakat luas. Selain itu, partai juga memanfaatkan media sosial dan kampanye digital untuk meningkatkan visibilitas produk-produk tersebut. Dengan dukungan ini, kader perempuan tidak hanya mendapatkan akses ke pasar tetapi juga membangun reputasi sebagai pelaku usaha yang kompeten.

Melalui diaspora kader di bidang ekonomi, Partai Demokrat berharap dapat meningkatkan peran serta kader perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan berkembangnya usaha-usaha kecil yang dikelola oleh perempuan, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kader perempuan juga diharapkan dapat menjadi contoh inspiratif bagi wanita lain di komunitas mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan kewirausahaan. Secara keseluruhan, diaspora kader dalam bidang ekonomi di Partai Demokrat merupakan langkah strategis untuk memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Dengan demikian, Partai Demokrat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan.

B. Tantangan Kaderisasi Perempuan

1. Rekrutmen Yang Terbatas

Rekrutmen perempuan dalam Partai Demokrat masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu persoalan mendasar adalah ketimpangan antara kebutuhan partai akan keterlibatan perempuan dengan pasokan kader perempuan yang tersedia. Meskipun berbagai regulasi dan dorongan afirmatif telah diperkenalkan, implementasinya sering kali belum maksimal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara komitmen formal partai terhadap kesetaraan gender dan praktik rekrutmen yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menyebabkan Partai Demokrat cenderung menggunakan mekanisme rekrutmen yang bersifat tertutup dan informal, terutama untuk perempuan. Perekrutan sering kali didasarkan pada kedekatan personal

dengan pengurus partai, hubungan kekeluargaan, atau loyalitas pribadi. Sistem ini tentu menutup peluang bagi perempuan-perempuan potensial yang tidak memiliki akses langsung ke lingkaran elit partai. Akibatnya, proses kaderisasi menjadi eksklusif dan tidak mencerminkan meritokrasi. Hal ini memperparah ketimpangan, karena banyak perempuan di luar sana yang memiliki kapasitas, namun tidak mendapatkan akses yang adil untuk terlibat.

Selain faktor struktural, ada pula hambatan kultural yang kuat. Dunia politik di Indonesia secara umum masih didominasi oleh budaya maskulin yang kerap menempatkan perempuan dalam posisi pinggiran. Perempuan yang ingin aktif di partai harus menghadapi stereotip, beban ganda domestik, serta minimnya ruang aman untuk berpendapat dan berproses. Partai politik belum sepenuhnya menjadi ruang yang ramah bagi perempuan untuk tumbuh, belajar, dan mengambil peran kepemimpinan. Tanpa pembenahan budaya internal partai, upaya mendorong keterlibatan perempuan akan selalu terbatas.

“Sekarang ini yang jadi persoalan tapi jarang dibahas padahal bisa dikatakan sangat krusial itu salah satunya persoalan manfaat ekonomi. Bagi banyak perempuan, terutama dari kelas menengah ke bawah, keputusan buat gabung dengan partai politik sering dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Beda dengan sektor lain yang menjanjikan pendapatan atau jenjang karier yang terukur, kaya keterlibatan dalam partai juga sifatnya sering kali sukarela, itu juga butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya pribadi, tanpa jaminan akan memperoleh posisi atau pengaruh. Bagi perempuan yang juga harus memikul tanggung jawab ekonomi rumah tangga, ini menjadi pertimbangan besar sih.” (Wawancara Ayu, 10 November 2025)

Ketidakseimbangan ini juga diperparah oleh minimnya ruang aman dan inklusif bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang dalam struktur partai. Budaya politik yang masih maskulin, serta kurangnya mentoring dan dukungan internal, menjadikan partai politik sebagai ruang yang belum sepenuhnya ramah bagi perempuan muda yang berminat untuk berkiprah. Potensi-potensi kader perempuan di akar rumput sering kali terabaikan karena absennya mekanisme scouting dan pelatihan yang berbasis meritokrasi. Selain itu, persepsi publik terhadap perempuan dalam politik masih belum sepenuhnya positif. Hal ini membuat banyak perempuan enggan

untuk terlibat lebih jauh karena khawatir menghadapi stigma atau tekanan sosial. Tanpa strategi komunikasi politik yang efektif dan sensitif gender, partai akan kesulitan membangun daya tarik bagi kader perempuan baru. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada stagnasi regenerasi kader perempuan dan rendahnya representasi dalam posisi pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, partai perlu membangun sistem rekrutmen terbuka yang lebih transparan dan akuntabel. Keterbukaan dalam proses ini akan memungkinkan munculnya kader-kader potensial dari luar lingkaran dekat pengurus. Selain itu, pelatihan kepemimpinan, peningkatan kapasitas, serta program mentoring yang dirancang khusus untuk perempuan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat basis kaderisasi perempuan secara berkelanjutan. Tanpa perubahan mendasar dalam pendekatan kaderisasi, partai politik akan terus menghadapi kesulitan dalam mewujudkan komitmen terhadap kesetaraan gender. Ketidakseimbangan supply and demand tidak bisa dibiarkan menjadi alasan stagnasi. Justru, inilah saatnya partai melakukan investasi serius pada penciptaan ekosistem politik yang lebih inklusif dan membuka jalan bagi hadirnya lebih banyak perempuan pemimpin di masa depan.

2. Hambatan Proses Kaderisasi

Hambatan dalam proses kaderisasi perempuan di Partai Demokrat sering kali berkaitan dengan stigma sosial yang menganggap bahwa peran perempuan hanya terbatas di ranah domestik, seperti di dapur. Stigma ini merupakan bagian dari budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia, di mana perempuan sering kali dianggap tidak pantas atau tidak mampu untuk terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan. Pandangan ini menghambat partisipasi aktif perempuan dalam struktur organisasi politik, termasuk dalam proses kaderisasi yang seharusnya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang.

Budaya patriarki yang dominan di masyarakat Indonesia menciptakan stereotip bahwa perempuan seharusnya fokus pada tanggung jawab rumah tangga dan keluarga. Menurut Mansour Fakih (1996) dalam *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, patriarki telah membentuk norma sosial yang membatasi peran perempuan hanya dalam ranah domestik,. Konsep ini menyebabkan perempuan sering kali dianggap

tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan. Hal ini membuat banyak perempuan merasa tidak percaya diri untuk terjun ke dunia politik, karena mereka dihadapkan pada anggapan bahwa peran mereka tidak relevan di luar rumah.

Stigma ini sering kali diperkuat oleh lingkungan sosial, dimana perempuan yang mencoba untuk berkiprah di bidang politik sering kali dianggap melanggar norma-norma tradisional. Akibatnya, banyak kader perempuan yang potensial merasa tertekan dan memilih untuk mundur dari proses kaderisasi. Partai politik, termasuk Partai Demokrat, terkadang kurang memberikan dukungan yang memadai bagi kader perempuan dalam menghadapi stigma ini. Dalam konteks kaderisasi politik, budaya patriarki membuat perempuan mengalami hambatan struktural dan sosial. Perempuan yang ingin terlibat dalam politik sering kali mendapat tekanan sosial atau bahkan diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menghambat mereka untuk maju ke jenjang struktural dalam partai politik, termasuk di Partai Demokrat (Mansour Fakih, 1996).

Meskipun ada kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan, implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak partai yang lebih fokus pada pemenuhan kuota secara formal tanpa memberikan pelatihan atau pembinaan yang cukup bagi kader perempuan. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang dicalonkan tidak memiliki kompetensi atau pengalaman yang memadai untuk bersaing dengan calon laki-laki, sehingga memperkuat pandangan negatif terhadap kemampuan mereka.

“Menurut saya bukan hanya demokrat, tetapi lebih general ke semua partai beberapa orang masih membedakan gender. Kemarin di Kudus juga habis pencalonan bupati, itu kan calon wakil nya juga Perempuan itu kan banyak juga orang yang sorry to say memandang Perempuan sebelah mata, padahal aslinya Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berpolitik. Sejauh ini di Partai Demokrat tidak ada masalah khusus memang kebanyakan timbul dari masalah gender yang tidak bisa setara antara laki-laki dan Perempuan.” (Wawancara Novia, 6 Januari 2025)

“Saat ini, Perempuan ikut partai itu dianggap remeh, dianggap kurang mampu untuk setara dengan laki-laki dalam hal berpolitik apalagi menjadi pemimpin. Padahal kalau mau Perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Perempuan itu juga condong bisa mengatur keuangan, masih bisa juga organisasi yang lain.” (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

Selain stigma gender, banyak perempuan juga enggan terlibat dalam politik karena persepsi negatif tentang dunia politik itu sendiri. Politik seringkali dipandang sebagai arena yang penuh dengan intrik dan permainan kotor, sehingga membuat banyak perempuan merasa tidak nyaman untuk berpartisipasi. Persepsi ini diperparah oleh kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan, sehingga menciptakan siklus di mana perempuan merasa terasing dari dunia politik. Tanpa adanya role model atau figur inspiratif di bidang politik, minat perempuan untuk terlibat semakin menurun.

“Secara srikandi kalau aku hambatannya saat ini keseluruhan karena stigma orang-orang tentang politik. Kegiatan seperti ini bisa dikatakan banyak menyita waktu, sedangkan Perempuan-perempuan kadang kalau di Indonesia rata-rata umur menikah itu 23-26 tahun padahal masa-masa itu masa-masa produktif untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah, mereka menutup diri untuk lebih fokus mengurus suami, fokus dengan pekerjaan rumah, atau fokus dengan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka yang bukan kegiatan laki-laki. Sejauh ini hambatannya masih stigma, kemampuan, pikiran karena kan sebenarnya kalau Perempuan itu berfikir dulu baru melakukan berbanding terbalik dengan laki-laki. Intinya dari semua ini kan Perempuan itu sulit apabila Perempuan itu tidak ada ketertarikan belajar politik Bersama. Pikirannya itu dibentuk dari dini, supaya kalo ada ketertarikan sudah pasti ada kemauan.” (Wawancara Ayu, 16 Desember 2024)

Proses kaderisasi juga terhambat oleh tantangan finansial dan akses terhadap jaringan politik. Banyak kader perempuan yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menjalankan kampanye politik yang kompetitif. Di sisi lain, akses ke jaringan politik yang kuat sering kali lebih mudah didapatkan oleh laki-laki, sehingga menambah kesulitan bagi perempuan untuk membangun dukungan yang diperlukan dalam proses pencalonan. Ketidaksetaraan ini menciptakan hambatan tambahan bagi kader perempuan dalam mencapai posisi strategis di partai. Saat ini, banyak program kaderisasi yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan. Tanpa adanya pelatihan dan dukungan yang memadai, sulit bagi kader perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tantangan politik. Program-program tersebut seharusnya mencakup pelatihan kepemimpinan, manajemen kampanye, serta strategi komunikasi efektif.

Bahkan ketika kader perempuan berhasil memasuki struktur kepengurusan partai, mereka sering kali ditempatkan pada posisi yang tidak strategis atau dianggap "tradisional". Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan partai. Kader perempuan sering kali hanya dijadikan pemenuh kuota tanpa diberikan kesempatan nyata untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam posisi kepemimpinan. Ini menciptakan kesan bahwa keterlibatan mereka hanya bersifat simbolis tanpa adanya substansi.

“Kalau dulu saya itu gini ya “mbak nyalon” terus saya gini “nek nyalon dalane piye?” kan saya tanya yang sudah jadi beberapa kali seperti yang sekarang sudah jadi ketua DPC. Saya dibandingkan dengan ketua DPC yang sekarang jadi malah lebih duluan saya yang mulai dari bawah, kalau ketua DPC itu malah masuk di pertengahan. Nah, waktu saya ngobrol itu tak tanyain “pak kok bisa jadi sampai sekarang itu bagaimana? Saya minta bocorannya lah” kaya saya berkecimpungan disini mbok saya diangkat opo pie. Masalah keuangan dari kita sendiri saya juga ragu, ya kalau saya jadi kalau nggak jadi ya gimana ya mbak. Dulu itu gini saya disuruh ikut di dapil nanti dibantu dalam arti nanti saya punya orang berapa tetapi sampai hari H saya tidak dikabarin apa-apa. Saya tanya ke teman-teman yang lain, yang kebetulan di dapil Dawe ternyata memang bener Perempuan dianggap hanya sebagai pendamping, coro jowone dinggo genep-genapan.” (Wawancara Mamik, 23 Desember 2024)

“Sejauh ini hanya untuk meningkatkan kualitas kader saja, karena balik lagi ya ga semua orang berkesempatan menempuh Pendidikan tinggi, nggak semua tapi buka semua Perempuan ngga berpendidikan bukan. Tapi saat ini kita lebih fokus meningkatkan SDM, SDM Perempuan yang mau berfikir, menerima, dan berjuang. Tetapi kalo dia nggak mau ya sudah tidak ada proses disitu. Pertama, semua partai hampir sama jadi keterikutan Perempuan hanya untuk mengisi 30%, semua partai nggak cuma partai Demokrat makannya bisa dilihat Perempuan disini sangat sedikit karena dari SDM sendiri kurang dan juga keinginan dan kemauan juga nggak ada. Gausah jauh-jauh, contohnya aku sendiri, aku juga gak mau aku Cuma memasukkan nama tapi aku nggak ada tuh bikin banner, aku bikin apa nggak ada, bahkan foto satupun nggak ada. Ya karena memang nggak ada pure pengen ya hanya untuk memenuhi keterikutan 30% . laki-laki nyaleg itu untuk berkerja berbeda dengan Perempuan. Poinnya kalau perempuan jadi ya untuk menyuarakan suara Perempuan kalau laki-laki jelas kerja.” (Wawancara Ayu, 16 Desember 2024)

Hambatan dalam kaderisasi perempuan tidak hanya berasal dari norma sosial, tetapi juga dari sistem partai politik yang kurang mendukung keterlibatan perempuan. Dalam *Perempuan dan Politik: Identitas, Representasi, dan Kepemimpinan*

(Suryadinata, 2005), disebutkan bahwa meskipun ada kuota keterwakilan perempuan dalam politik, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Kurangnya pelatihan kepemimpinan bagi perempuan dalam partai politik.
- 2) Dominasi laki-laki dalam struktur kepemimpinan yang membuat perempuan sulit mendapatkan akses ke posisi strategis.
- 3) Rendahnya dukungan finansial dan sumber daya bagi kader perempuan untuk bersaing dalam politik.

Partai politik termasuk Partai Demokrat, sering kali belum memiliki mekanisme yang jelas dan sistematis dalam memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam kaderisasi.

Secara keseluruhan, hambatan dalam proses kaderisasi perempuan di Partai Demokrat sangat dipengaruhi oleh stigma sosial dan budaya patriarki yang masih kuat. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi partai untuk melakukan reformasi internal dengan memperkuat program pemberdayaan dan menyediakan kesempatan kepemimpinan yang setara bagi kader perempuan. Dengan demikian, partai dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam politik, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan mereka di lembaga legislatif dan pengambilan keputusan lainnya.

BAB V

**REPRESENTASI PEREMPUAN DI DALAM KEPENGURUSAN PARTAI
DEMOKARAT**

A. Realitas Representasi Perempuan

Representasi perempuan dalam kepengurusan Partai Demokrat menjadi penting untuk dibahas, terutama dalam konteks posisi strategis versus posisi simbolik perempuan di dalam struktur partai. Partai Demokrat telah menerapkan kebijakan afirmatif dengan menetapkan kuota minimal 30% perempuan dalam struktur partai, sebagai bentuk komitmen terhadap keterwakilan perempuan. Namun, kehadiran perempuan dalam kepengurusan partai tidak selalu mencerminkan keterlibatan yang bermakna dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Posisi strategis perempuan mengacu pada peran perempuan yang memiliki akses dan wewenang dalam menentukan arah kebijakan dan strategi partai, sedangkan posisi simbolik lebih menempatkan perempuan sebagai representasi formal yang memenuhi kuota tanpa kekuatan nyata. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perempuan dalam Partai Demokrat benar-benar memiliki peran strategis atau hanya menjadi simbol pemenuhan regulasi.

Berikut data kader perempuan yang masuk dalam struktur Partai Demokrat Kabupaten Kudus :

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Yusrina Irayati	SMA	Anggota Badan Pemenangan Pemilu
2	Maftuchah Agustiani	SMA	Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Cabang
3	Ratna Dianti	SMA	Anggota Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Cabang
4	Leli Nofita, S. E	S1 Sarjana Ekonomi	Anggota Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Cabang
5	Mamik	SMA	Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang
6	Endang Mustika Ayemsari	SMA	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang

7	Rani Haryanti	SMA	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang
8	Nanik Sugianti	SMA	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang
9	Jumiati	SMA	Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang
10	Descha Annisya, S. E	S1 Sarjana Ekonomi	Sekretaris Bidang Komunikasi Strategi Daerah
11	Tri Indrayanti	SMA	Anggota Bidang Komunikasi Strategi Daerah
12	Amelia Permata Putri	SMA	Anggota Bidang Komunikasi Strategi Daerah
13	Luthfiah Nawami	SMA	Anggota Bidang Komunikasi Strategi Daerah
14	Nur Hidayati	SMA	Anggota Bidang Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Cabang
15	Siti Fatimatuazzahro	SMA	Anggota Bidang Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Cabang
16	Ani Risnawati	SMA	Anggota Bidang Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Cabang
17	Indari Putri Melati	SMA	Anggota Bidang Doktrin, Pendidikan, dan Pelatihan Cabang
18	Devi Kasmiya	SMA	Ketua Bidang Pembinaan Jaringan dan Konstituen
19	Jama'ah	SMA	Anggota Bidang Pembinaan Jaringan dan Konstituen
20	Niken Diah Sintawati, A. md. Keb	D3	Anggota Bidang Pembinaan Jaringan dan Konstituen
21	Utami Nur Indah	SMA	Anggota Bidang Pembinaan Jaringan dan Konstituen
22	Eva Kurnia Utama	SMA	Anggota Bidang Pembinaan Jaringan dan Konstituen
23	Lisa Octavia Damayanti	SMA	Ketua Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang
24	Widya Ayu Pratiwi	SMA	Sekretaris Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang
25	Arum Dyah Linawati	SMA	Anggota Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang
26	Nur Lailatun Nafisah	SMA	Anggota Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang

27	Siti Nuryatin	SMA	Anggota Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang
28	Aulya Destiana	SMA	Anggota Bidang Hukum dan Pengamanan Partai Cabang

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Srikandi Partai Demokrat

Sumber: *Data Partai Demokrat Kudus*

Analisis teori supply and demand ala Norris dan Lavenduski (2016) dalam konteks representasi perempuan di Partai Demokrat memberikan kerangka untuk memahami ketidakseimbangan antara kehadiran perempuan secara simbolik dan peran strategis yang sebenarnya. Dalam perspektif ini, “*supply*” merujuk pada ketersediaan kader perempuan yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan potensi kepemimpinan sangat minim dihasilkan dari proses kaderisasi Partai Demokrat yang sudah berjalan. Sementara “*demand*” mencerminkan kebutuhan dan keinginan partai dalam memilih kader untuk posisi tertentu. Kedua elemen ini saling mempengaruhi, sehingga jika dilihat dari data diatas terdapat kegagalan menyeimbangkan antara *supply* dan *demand* menghasilkan penempatan perempuan yang hanya bersifat formal tanpa kekuatan pengaruh yang nyata dalam pengambilan keputusan.

Di satu sisi, kebijakan afirmatif yang diterapkan Partai Demokrat, seperti penetapan kuota minimal 30% perempuan dalam struktur partai, merupakan upaya untuk meningkatkan “*demand*” akan kehadiran perempuan secara strategis. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan sinyal bahwa partai mendukung keterwakilan gender. Namun, kebijakan tersebut tidak secara otomatis meningkatkan jumlah atau kualitas calon perempuan yang mampu mengisi posisi strategis, sehingga “*supply*” berupa kader perempuan yang terlatih dan siap berperan dalam pembentukan kebijakan pun menjadi relatif terbatas. Dengan demikian, terjadilah ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realitas kapasitas kepemimpinan.

Dari perspektif strategi internal partai, posisi strategis memerlukan indikator kapabilitas seperti pengalaman dalam pengambilan keputusan, jaringan politik yang kuat, dan keterampilan manajerial. Sayangnya, proses kaderisasi dalam Partai Demokrat yang berbasis kedekatan personal dan hubungan informal

cenderung lebih mendukung penunjukan perempuan untuk peran-peran simbolik. Di sini, “*demand*” partai dalam mengisi posisi strategis tidak terpenuhi karena adanya kekhawatiran terhadap tantangan organisasi yang lebih kompleks, sehingga perempuan dengan potensi strategis justru terpinggirkan. Hal ini menggambarkan adanya misalokasi antara jumlah kandidat perempuan yang tersedia dan jenis peran yang mereka isi. Selain itu, teori supply and demand Norris dan Lavenduski (2016) menunjukkan bahwa struktur dan budaya organisasi turut mempengaruhi kedua aspek tersebut.

Dalam lingkungan partai yang masih didominasi oleh budaya maskulin, *demand* untuk keterwakilan perempuan cenderung lebih bersifat simbolik demi memenuhi formalitas dan ekspektasi publik daripada membangun kapasitas kepemimpinan yang mendalam. Akibatnya, perempuan yang memiliki kemampuan strategis sering kali tidak mendapatkan akses untuk mengembangkan potensi mereka karena mekanisme rekrutmen yang mengedepankan kriteria non-meritokratis. Dengan demikian, *supply* potensial perempuan dalam kapasitas kepemimpinan strategis terhambat oleh preferensi dan praktik internal partai. Ketidakseimbangan *supply* dan *demand* ini menciptakan dilema yang mendasar, meski kebijakan kuota mengharuskan peningkatan keterlibatan perempuan, realitas yang terjadi adalah penempatan perempuan dalam peran yang terbatas secara makna. Posisi simbolik yang lebih mudah diisi memberikan ilusi keterwakilan tanpa mengubah dinamika kekuasaan di dalam partai.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan kuota tanpa perbaikan sistem kaderisasi dan pembinaan akan menghasilkan “*dummy representation*”, di mana keberadaan perempuan hanyalah formalitas belaka dan tidak berdampak pada perubahan strategis maupun kebijakan partai. Perempuan hanya hadir sebagai formalitas administratif tanpa pengaruh signifikan dalam struktur pengambilan keputusan. Kondisi ini terlihat dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pimpinan inti atau badan strategis dalam partai, sehingga peran perempuan lebih banyak bersifat representasi deskriptif dan simbolik.

Hasil wawancara dengan salah satu pengurus perempuan Partai Demokrat Kabupaten Kudus mengungkapkan bahwa meskipun perempuan sudah mulai banyak terlibat dalam kepengurusan, sebagian besar masih ditempatkan pada

posisi yang tidak berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan strategis partai.

“Perempuan di Partai Demokrat Kudus memang sudah mulai banyak yang terlibat dalam kepengurusan partai, mbak. Tapi, kalau bicara soal posisi strategis, jumlahnya ya bisa dikatakan masih sangat terbatas. Kebanyakan perempuan ditempatkan di bidang-bidang yang sifatnya administratif atau pendukung, seperti sekretariat, anggota bidang sosial kemasyarakatan, dan organisasi sayap perempuan. Posisi-posisi ini memang penting, tapi sayangnya tidak memberikan ruang yang cukup untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis partai.” (Wawancara Nanik, 14 April 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas perempuan sudah mulai terlihat, kualitas keterlibatan mereka dalam posisi strategis masih perlu ditingkatkan agar representasi perempuan tidak hanya menjadi simbol semata.

Perbedaan antara posisi strategis dan simbolik memiliki implikasi yang sangat besar terhadap efektivitas representasi perempuan dalam Partai Demokrat Kabupaten Kudus. Posisi simbolik cenderung menjadikan keterwakilan perempuan sebagai pemenuhan kuota administratif semata, tanpa memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara nyata dalam pengambilan kebijakan. Akibatnya, potensi perempuan sebagai agen perubahan dan penggerak kebijakan inklusif menjadi terhambat. Sebaliknya, posisi strategis memungkinkan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan secara lebih efektif serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan partai yang responsif dan progresif. Dalam konteks Kabupaten Kudus, keterbatasan posisi strategis perempuan juga berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD, yang tercermin dari data keterwakilan perempuan yang hanya sekitar 8,89% pada periode 2019-2024. Hal ini menunjukkan bahwa posisi simbolik dalam kepengurusan partai turut berkontribusi pada rendahnya kualitas representasi perempuan di lembaga legislatif.

“Saya seringkali itu ngerasa gini, mbak mosok saya ikut Partai Demokrat itu posisi saya cuma jadi simbolik aja, hanya untuk memenuhi kuota. Ya gampangane ki ya nggo genepno partai ben iso memenuhi peraturan 30% itu. Sering banget itu mbak dalam hal strategi pemenangan pemilu dan kebijakan partai, suara perempuan seperti saya dan rekan-rekan

perempuan yang lain itu kurang diperhatikan. Padahal sebenarnya kami punya ide yang bisa memperkaya kebijakan, terutama terkait isu perempuan dan anak. Kalau perempuan di kepengurusan atas tidak diberi ruang strategis, perempuan di akar rumput juga kurang termotivasi untuk aktif, dan itu sudah pasti tidak terelakkan.” (Wawancara Tri, 18 April 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa posisi simbolik tidak hanya membatasi peran perempuan di tingkat pusat, tetapi juga berdampak pada partisipasi perempuan secara keseluruhan dalam partai.

Lebih jauh Ibu Tri yang juga aktif dalam kepengurusan, menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas perempuan agar siap mengisi posisi strategis.

“Sekarang itu banyak kok perempuan yang sebenarnya punya potensi besar, tapi kurang mendapatkan kesempatan dan dukungan untuk berkembang. Misal nih, kalau ada pelatihan yang lebih terstruktur aslinya kami yakin perempuan bisa berkontribusi lebih dalam posisi strategis,” (Wawancara.Tri, 18 April 2025) Ia juga mengungkapkan bahwa dukungan dari sesama perempuan dalam partai sangat penting untuk saling menguatkan dan mendorong keterlibatan yang lebih bermakna.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa posisi simbolik perempuan dalam kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Kudus masih cukup dominan. Posisi ini membuat perempuan sulit untuk berkontribusi secara penuh dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan partai. Dampaknya, potensi perempuan sebagai agen perubahan yang mampu memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok rentan belum maksimal. Padahal, posisi strategis sangat penting agar perempuan dapat memberikan pengaruh nyata dalam arah dan kebijakan partai.

Secara keseluruhan, dalam hal ini menggambarkan bahwa meskipun Partai Demokrat Kabupaten Kudus telah membuka ruang bagi perempuan dalam kepengurusan, posisi strategis perempuan masih sangat terbatas dan seringkali hanya bersifat simbolik. Posisi simbolik yang masih mendominasi harus diatasi dengan Langkah-langkah konkret agar perempuan dapat mengisi posisi strategis secara proporsional dan berkontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Langkah-langkah itu bisa dimulai dengan melakukan pelatihan yang

terstruktur, pembinaan, dan perubahan budaya organisasi yang inklusif serta dukungan penuh dari seluruh anggota partai. Dengan demikian, perempuan di dalam Partai Demokrat Kabupaten Kudus tidak hanya hadir sebagai pengurus formal, tetapi benar-benar memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan dan arah politik partai.

B. Faktor Penghambat Keterlibatan Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Partai Demokrat Kabupaten Kudus menghadapi berbagai tantangan yang menghambat mereka untuk berperan secara optimal, terutama dalam mengisi posisi strategis. Meskipun terdapat kebijakan afirmatif dan dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih sering terjebak dalam posisi simbolik yang kurang memberikan ruang pengaruh nyata. Berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat sosial, budaya, maupun struktural, turut berkontribusi pada kondisi ini. Pemahaman terhadap faktor-faktor penghambat tersebut sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam memperkuat posisi perempuan di partai dan meningkatkan kualitas representasi mereka. Berikut faktor-faktor penghambat keterlibatan perempuan, yaitu:

a. Budaya Patriarki dan Stereotip Gender

Budaya patriarki merupakan salah satu faktor utama yang menghambat keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia, termasuk di tingkat lokal seperti Kabupaten Kudus. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai sosok dominan yang memiliki hak dan kewenangan utama dalam ranah publik, sementara perempuan dianggap lebih cocok mengurus urusan domestik dan keluarga. Dalam konteks politik, budaya patriarki menciptakan persepsi bahwa politik adalah dunia laki-laki, sehingga perempuan dianggap tidak pantas atau tidak mampu untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini menimbulkan hambatan struktural dan psikologis bagi perempuan untuk maju dan berkompetisi secara setara. Budaya patriarki ini juga membentuk struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga akses perempuan terhadap sumber daya politik dan peluang kepemimpinan menjadi sangat terbatas.

Stereotip gender yang melekat erat dengan budaya patriarki juga berperan besar dalam membatasi ruang gerak perempuan di dunia politik. Stereotip ini membentuk persepsi normatif bahwa perempuan lebih lemah, kurang rasional, dan kurang kompeten dibandingkan laki-laki dalam mengelola urusan publik dan pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, perempuan sering kali dipandang sebagai pelengkap atau simbol tanpa kekuatan nyata, yang hanya memenuhi kuota formal tanpa diberi kesempatan berkontribusi secara substantif. Stereotip semacam ini tidak hanya melemahkan posisi perempuan dalam politik, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat dan elit politik terhadap kemampuan perempuan untuk memimpin dan membuat kebijakan yang efektif.

“Sekarang itu banyak perempuan yang dianggap remeh, kasarannya kalau perempuan itu tugasnya hanya di dapur saja dan tidak mampu setara dengan laki-laki dalam hal berpolitik. Jadi kalau mau terjun ke politik, sering dianggap aneh atau kurang pantas. Nah yang seperti ini terkadang membuat kami harus berjuang dua kali lipat untuk membuktikan diri.” (Wawancara Nanik, 14 April 2025)

Stereotip gender yang melekat erat dengan budaya patriarki juga berperan besar dalam membatasi ruang gerak perempuan di dunia politik. Stereotip ini membentuk persepsi normatif bahwa perempuan lebih lemah, kurang rasional, dan kurang kompeten dibandingkan laki-laki dalam mengelola urusan publik dan pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, perempuan sering kali dipandang sebagai pelengkap atau simbol tanpa kekuatan nyata, yang hanya memenuhi kuota formal tanpa diberi kesempatan berkontribusi secara substantif.

Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Kudus menjadi penghalang signifikan bagi representasi perempuan dalam partai politik, khususnya Partai Demokrat. Kultur ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Di Kabupaten Kudus, fenomena ini terlihat jelas dalam dinamika keanggotaan partai, di mana perempuan sering diposisikan pada peran-peran sekunder dan jarang menduduki jabatan strategis dalam struktur partai. Budaya patriarki juga berdampak pada kesulitan perempuan untuk mengakses jaringan politik

yang umumnya didominasi laki-laki, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk membangun basis dukungan yang kuat.

Dalam konteks Kabupaten Kudus yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, faktor *supply* terganggu oleh hambatan struktural dan psikologis yang menghalangi perempuan untuk maju ke arena politik. Budaya yang menempatkan perempuan sebagai pengurus domestik dan menstigmatisasi perempuan sebagai kurang kompeten dalam politik menyebabkan rendahnya jumlah perempuan yang percaya diri, didukung, dan difasilitasi untuk menjadi aktor politik. Ini menghasilkan *low supply* kader perempuan yang siap bersaing secara terbuka dalam dunia politik lokal (Norris & Lavenduski, 2016)

Sementara di sisi *demand*, budaya patriarki juga membatasi keterbukaan institusi politik dalam memberikan ruang strategis bagi perempuan. Stereotip yang menganggap perempuan tidak rasional dan tidak cocok memimpin menghambat kemauan elit politik untuk merekrut atau mengangkat perempuan ke posisi strategis. Akibatnya, meskipun ada kebijakan afirmatif seperti kuota, implementasinya sering kali bersifat simbolik perempuan hadir untuk memenuhi aturan, bukan karena adanya dorongan *demand* yang sejati terhadap kontribusi mereka (Norris & Lavenduski, 2016)

"Saya itu gabung sama Partai Demokrat udah lumayan lama, tapi sampai sekarang masih sulit sekali untuk dianggap serius dalam rapat-rapat strategis partai. Kadang malah yang dilibatkan dalam rapat ya orang-orang tertentu, pernah saya coba mengajukan pendapat tetapi dianggap kurang oke begitu, tapi beda kalau laki-laki yang berbicara langsung didengarkan. Ini sudah jadi semacam tradisi tidak tertulis ya, mbak. Nggak cuma saya aja mbak teman perempuan saya yang lain ya sama." (Wawancara Tri, 18 April 2025)

Fenomena tersebut merefleksikan pola interaksi yang timpang dalam budaya patriarki, di mana opini perempuan secara sistematis dimarginalkan. Analisis terhadap pola komunikasi dalam beberapa rapat partai menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan waktu bicara yang lebih sedikit dibandingkan

rekan laki-laki. Ketika perempuan berbicara, mereka lebih sering diinterupsi dan gagasan mereka jarang dikembangkan dalam diskusi lanjutan.

Stereotip gender yang berlaku dalam masyarakat Kudus secara signifikan mempengaruhi proses rekrutmen dan penugasan dalam Partai Demokrat. Perempuan seringkali direkrut untuk mengisi posisi yang dianggap "sesuai" dengan karakteristik feminin seperti sekretariat, anggota bidang, atau bendahara, sementara posisi strategis terkait penggalangan massa, strategi politik, dan kepemimpinan hampir selalu diisi oleh laki-laki. Praktik ini mencerminkan pandangan stereotipikal bahwa perempuan kurang memiliki kapasitas kepemimpinan atau kemampuan strategis dibandingkan laki-laki. Walaupun beberapa perempuan menunjukkan kemampuan dan kualifikasi yang mumpuni, mereka tetap menghadapi hambatan yang lebih besar dalam menduduki posisi penting atau menjadi kandidat untuk jabatan publik. Sistem penugasan yang berbasis stereotip gender ini membatasi pengalaman perempuan dalam aspek-aspek krusial politik praktis, sehingga menciptakan lingkaran setan di mana perempuan terus dianggap kurang berpengalaman untuk peran-peran strategis.

“Coba mbak lihat dibagian struktur Partai Demokrat, kan banyak itu disitu perempuan lebih banyak ditempatkan dibagian anggota entah itu di struktural badan maupun bidang, sekretaris itu juga beberapa mbak yang diposisikan, jarang kan yang ditaruh diposisi atas seperti ketua gitu, ada tapi tidak banyak.” (Wawancara Tri, 18 April 2025)

Pernyataan ini mengindikasikan adanya prasangka berbasis gender yang membatasi mobilitas vertikal perempuan dalam struktur partai. Distribusi penugasan yang tidak merata ini tidak berkorelasi dengan kompetensi, melainkan lebih mencerminkan bias gender yang mengasosiasikan perempuan dengan peran-peran pendukung dan administratif.

b. Beban Ganda dan Keterbatasan Sumber Daya

Beban peran ganda menjadi faktor krusial yang menghambat keterlibatan aktif perempuan dalam politik di Partai Demokrat Kabupaten Kudus. Beban ini muncul karena perempuan harus membagi waktu dan energi

antara tanggung jawab domestik, seperti mengurus keluarga dan rumah tangga, dengan tuntutan untuk aktif dalam kegiatan politik yang menuntut komitmen waktu yang besar. Kewajiban domestik yang melekat secara sosial dan budaya ini sering kali menjadi kendala serius bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam aktivitas politik. Dalam konteks Kabupaten Kudus, di mana nilai-nilai tradisional masih kuat, beban ganda ini semakin mempersempit ruang gerak perempuan dalam partai, sehingga posisi strategis sulit diraih. Beban ganda tidak hanya memengaruhi kehadiran fisik perempuan, tetapi juga berdampak pada kualitas keterlibatan dan kemampuan mereka untuk berkontribusi secara maksimal.

"Setiap ada kegiatan partai yang selesainya malam, saya harus berpikir berkali-kali. Ya kadang juga saya terpaksa izin di tengah rapat penting karena urusan keluarga. Akibatnya, saya sering dianggap kurang serius dalam politik, padahal ini masalah pembagian waktu yang tidak adil," (Wawancara Nanik, 14 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana beban ganda menjadi hambatan nyata yang menguras energi dan mengurangi efektivitas keterlibatan perempuan. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang mengharapkan perempuan mengutamakan peran domestik juga menambah beban psikologis yang membuat perempuan sulit untuk berkomitmen penuh dalam politik. Kondisi ini mengakibatkan perempuan cenderung menempati posisi simbolik yang tidak menuntut keterlibatan waktu dan energi yang besar.

Selain beban ganda, keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan yang menghalangi perempuan untuk berperan aktif dan strategis dalam partai. Sumber daya yang dimaksud meliputi akses terhadap modal finansial, jaringan politik, pendidikan politik, dan pelatihan kepemimpinan. Banyak perempuan di Kabupaten Kudus yang belum memiliki akses memadai terhadap sumber daya tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk membangun basis dukungan dan memperkuat posisi dalam partai. Keterbatasan modal finansial misalnya, membuat perempuan kesulitan untuk membiayai kegiatan politik seperti kampanye atau pengorganisasian massa. Hal ini semakin

memperlebar kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih posisi strategis di partai.

“Sejujurnya ya mbak, saya itu juga pengen lebih aktif dan maju dalam partai, tapi itu tadi banyak faktor-faktor yang menghambat saya contohnya saya sendiri terkendala modal dan jaringan yang belum luas. Apalagi posisi saya ini juga sebagai ibu rumah tangga dan keuangan pastinya juga suami harus tau. Banyak laki-laki yang sudah punya koneksi dan dukungan finansial, sedangkan kami harus berjuang sendiri.” (Wawancara Nanik, 14 April 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama yang membuat perempuan sulit bersaing secara setara dengan kader laki-laki. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendidikan politik khusus perempuan juga membuat banyak perempuan kurang siap menghadapi dinamika politik yang kompetitif dan keras, sehingga mereka cenderung menghindari posisi yang menuntut kemampuan strategis tinggi.

Beban ganda dan keterbatasan sumber daya juga saling berkaitan dan memperkuat hambatan yang dihadapi perempuan. Beban domestik yang berat membatasi waktu dan energi perempuan untuk mengembangkan kapasitas politik dan membangun jaringan yang diperlukan. Sementara itu, keterbatasan sumber daya membuat perempuan sulit mendapatkan pelatihan dan dukungan yang bisa membantu mereka mengelola beban tersebut dengan lebih baik. Kondisi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana perempuan terus terjebak dalam posisi simbolik tanpa peluang untuk berkembang ke posisi strategis. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan harus memperhatikan kedua faktor ini secara simultan agar hasilnya efektif dan berkelanjutan. Banyak perempuan kader yang merasa belum mendapatkan dukungan penuh untuk menyeimbangkan peran domestik dan politik. Selain itu, akses terhadap modal dan pelatihan masih belum merata, sehingga perempuan yang ingin maju harus berjuang keras secara mandiri. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam memberdayakan perempuan di partai agar mereka dapat berperan secara optimal.

Ketimpangan antara *supply* dan *demand* ini menciptakan siklus stagnan: partai tidak aktif mencari kader perempuan yang potensial karena menganggap mereka tidak tersedia atau tidak kompeten (rendah *demand*), sementara perempuan enggan masuk politik karena merasa tidak diinginkan dan tidak akan diberi ruang yang adil (rendah *supply*). Adanya budaya patriarki ditambah beban ganda dan keterbatasan sumber daya ini menjadi akar dari ketimpangan ini, karena ia menghambat baik sisi pasokan maupun permintaan dalam sistem politik lokal (Norris & Lavenduski, 2016)

c. Minimnya Akses Pelatihan dan Kaderisasi

Minimnya akses pelatihan dan kaderisasi menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam meningkatkan keterlibatan perempuan secara strategis dalam kepengurusan Partai Demokrat di Kabupaten Kudus. Pelatihan dan kaderisasi merupakan proses penting untuk membekali perempuan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang dibutuhkan dalam dunia politik yang kompetitif. Namun, kenyataannya akses perempuan terhadap pelatihan politik dan kaderisasi masih sangat terbatas. Banyak perempuan kader yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang memadai, baik dari segi materi maupun durasi, sehingga mereka kurang siap menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan dan posisi strategis. Kondisi ini menghambat perempuan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam partai.

Dalam wawancara dengan beberapa pengurus perempuan Partai Demokrat Kabupaten Kudus, terungkap bahwa pelatihan yang diberikan selama ini belum cukup menyentuh kebutuhan spesifik perempuan.

“Pelatihan yang kami terima masih umum mbak itu juga nggak fokus sama pengembangan kapasitas perempuan secara khusus. Kita itu juga butuh pelatihan yang membahas strategi politik, kepemimpinan perempuan, dan cara menghadapi tantangan di lapangan, yang lebih ke perempuan banget itu belum ada mbak” (Wawancara Tri, 18 April 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan perempuan kader untuk memperkuat posisi mereka

dalam partai. Selain itu, keterbatasan frekuensi dan jangkauan pelatihan juga membuat banyak perempuan kader di daerah sulit mengakses program pembinaan secara rutin.

Kaderisasi yang efektif sangat penting untuk menyiapkan kader perempuan yang kompeten dan siap mengisi posisi strategis dalam partai. Namun, dalam praktiknya, proses kaderisasi perempuan di Partai Demokrat Kabupaten Kudus masih belum berjalan optimal. Banyak kader perempuan yang merasa kurang mendapatkan bimbingan dan pendampingan yang intensif dari senior atau mentor perempuan yang sudah berpengalaman. Hal ini menyebabkan kader perempuan kesulitan mengembangkan jaringan dan kemampuan politik yang diperlukan untuk naik ke posisi strategis. Minimnya kaderisasi yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas representasi perempuan di partai.

“Saya merasa kurang mendapat arahan dan dukungan dalam proses kaderisasi. Kadang juga kami hanya diberi tugas administratif tanpa pembekalan yang cukup untuk menghadapi dinamika politik yang kompleks.” (Wawancara Tri, 18 April 2025)

Pernyataan ini menegaskan bahwa kurangnya kaderisasi yang terencana dan terfokus pada pemberdayaan perempuan membuat mereka sulit berkembang dan berperan aktif. Selain itu, minimnya mentor perempuan yang bisa menjadi panutan dan pembimbing juga mempersempit peluang kader perempuan untuk belajar dan beradaptasi dengan dunia politik yang keras dan penuh tantangan.

Pelatihan dan kaderisasi yang terbatas juga berdampak pada rendahnya kepercayaan diri perempuan kader untuk maju dalam pencalonan atau mengambil peran strategis. Tanpa bekal yang cukup, perempuan cenderung merasa kurang siap dan takut menghadapi persaingan politik yang ketat. Hal ini membuat banyak perempuan memilih untuk tetap berada di posisi simbolik yang lebih aman dan minim tekanan. Dengan demikian, minimnya pelatihan dan kaderisasi secara langsung menghambat peningkatan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi kunci di partai.

d. Kesenjangan Aspirasi Politik Perempuan dan Laki-Laki

Kesenjangan aspirasi politik antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kudus tercermin dari perbedaan signifikan dalam ambisi politik dan motivasi berkarir di ranah publik. Laki-laki cenderung menunjukkan ambisi politik yang lebih eksplisit dan berorientasi pada pencapaian jabatan serta kekuasaan. Sebaliknya, perempuan lebih cenderung termotivasi oleh keinginan menyelesaikan masalah konkret di masyarakat dan kurang terdorong oleh pencapaian status politik. Perbedaan ini berakar pada sosialisasi politik yang berbeda sejak dini, dimana laki-laki didorong untuk bersaing dan memimpin, sementara perempuan diarahkan pada peran pengasuhan dan pemeliharaan komunitas. Budaya politik Kudus yang masih kental dengan nilai-nilai Jawa-Islam tradisional juga memengaruhi bagaimana aspirasi politik diekspresikan. Perbedaan motivasi ini mengakibatkan kesenjangan dalam perilaku pencarian kekuasaan, dimana perempuan cenderung lebih ragu-ragu untuk secara aktif mengklaim posisi kepemimpinan atau secara terbuka mengekspresikan ambisi politik mereka, khawatir dianggap terlalu agresif atau melanggar norma sosial.

“Saat ini Srikandi lebih fokus meningkatkan SDM, SDM Perempuan yang mau berfikir, menerima, dan berjuang. Tetapi kalo dia nggak mau ya sudah tidak ada proses disitu. Pertama, semua partai hampir sama jadi keterikutan Perempuan hanya untuk mengisi 30%, semua partai nggak cuma partai Demokrat makannya bisa dilihat Perempuan disini sangat sedikit karena dari SDM sendiri kurang dan juga keinginan dan kemauan juga nggak ada. Gausah jauh-jauh, contohnya aku sendiri, aku juga gak mau aku Cuma memasukkan nama tapi aku nggak ada tuh bikin banner, aku bikin apa nggak ada, bahkan foto satupun nggak ada. Ya karena memang nggak ada pure pengen ya hanya untuk memenuhi keterikutan 30% . laki-laki nyaleg itu untuk berkerja berbeda dengan Perempuan. Poinnya kalau perempuan jadi ya untuk menyuarakan suara Perempuan kalau laki-laki jelas kerja.”
(Wawancara Ayu, 16 Desember 2024)

Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam cara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kudus memandang dan mengkonseptualisasikan kepemimpinan politik. Laki-laki cenderung memahami kepemimpinan politik sebagai posisi otoritas dan kekuasaan yang memungkinkan pengambilan

keputusan, sedangkan perempuan lebih cenderung melihatnya sebagai wadah untuk melayani dan memfasilitasi kesejahteraan masyarakat. Konsepsi kepemimpinan yang berbeda ini memengaruhi bagaimana mereka memposisikan diri dalam kontestasi politik. Laki-laki lebih percaya diri mengklaim kualifikasi kepemimpinan berdasarkan atribut personal seperti ketegasan dan keberanian, sementara perempuan sering merasa perlu membuktikan kapasitas mereka melalui pencapaian konkret dan kualifikasi formal. Perbedaan konsepsi ini juga terlihat dari komunikasi politik, dimana kandidat laki-laki sering menekankan visi dan perubahan besar, sementara kandidat perempuan lebih fokus pada isu-isu spesifik dan solusi praktis untuk masalah sehari-hari masyarakat.

Kesenjangan aspirasi politik juga diperparah oleh kurangnya figur perempuan yang menjadi panutan atau role model dalam politik lokal. Ketika perempuan jarang terlihat menduduki posisi strategis atau berpengaruh, hal ini membuat perempuan lain sulit membayangkan dan termotivasi untuk berani berpartisipasi secara aktif. Ketiadaan role model perempuan yang kuat dan inspiratif menyebabkan rendahnya motivasi dan kepercayaan diri perempuan untuk mengembangkan aspirasi politiknya. Oleh karena itu, keberadaan perempuan yang sukses dan berpengaruh dalam politik sangat penting sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi perempuan lain agar lebih aktif dan percaya diri dalam berkontribusi di ranah politik.

Secara keseluruhan, kesenjangan aspirasi politik antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kudus mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Aspirasi politik perempuan yang terhambat oleh faktor sosial, budaya, dan struktural harus menjadi perhatian utama dalam upaya pemberdayaan perempuan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perempuan dapat berperan lebih aktif dan strategis dalam politik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pola kaderisasi perempuan dalam Partai Demokrat di Kabupaten Kudus diimplementasikan dalam sistem kaderisasi informal. Proses ini dimulai dengan rekrutmen terbuka, dilanjutkan dengan pendidikan politik yang mencakup pemahaman ideologi partai, kepemimpinan, dan strategi politik. Para kader perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka melalui pelatihan, seminar, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan partai. Namun, beberapa hambatan masih ditemui seperti minimnya sumber daya untuk menjalankan program kaderisasi secara optimal, rendahnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik yang disebabkan oleh faktor sosial-budaya, serta kuatnya pandangan patriarki yang masih mengakar di masyarakat Kudus.

Representasi perempuan di Partai Demokrat berakar pada ketidakseimbangan antara ketersediaan kader perempuan berkualitas (*supply*) dan kebutuhan partai terhadap mereka di posisi strategis (*demand*). Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota 30% telah diterapkan, mekanisme kaderisasi yang tidak meritokratis dan budaya organisasi yang masih maskulin membuat peran perempuan cenderung simbolik dan tidak berdampak nyata. Akibatnya, keterwakilan perempuan hanya bersifat formalitas tanpa disertai pengaruh strategis dalam pengambilan keputusan partai. Serta terdapat banyak faktor penghambatnya

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba membuat saran-saran yang mungkin dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap penelitian yang telah dilakukan ini. Adapun saran-saran yang dapat dibuat penulis adalah sebagai berikut :

1. Partai Demokrat Kabupaten Kudus perlu membangun sistem kaderisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dengan kurikulum yang jelas untuk pengembangan kepemimpinan perempuan.

2. Mengalokasikan anggaran khusus untuk program peningkatan kapasitas kader perempuan, termasuk pelatihan *public speaking*, manajemen kampanye, dan strategi politik.
3. Membangun jaringan kerjasama dengan organisasi perempuan dan komunitas lokal untuk memperluas basis dukungan dan rekrutmen kader potensial.
4. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Diah. (2019). *Rekrutmen Kandidat Perempuan oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007*. dalam JDPL: Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal), Vol. 1, No. 1.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aspinall, E. (2014). *Politics and Patronage in Indonesia*. Journal of Southeast Asian Studies.
- Azzahra, R. (2021). *Kaderisasi Partai Politik Analisis Kaderisasi Digital dalam Sekolah Kader Partai Solidaritas Indonesia*. dalam Tesis Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Budihardjo, Miriam. (1993). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budihardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Fajri & Effendi Hasan. (2021). *Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Politik Gerindra: Studi Kasus pada DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan*. dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 9, No. 2
- Fakih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Ferdian, Ridho dkk. (2020). *Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai*. dalam WP Journal: Wacana Publik, Vol. 14, No. 1.
- Hartoni, Ridho Mochammad. (2021). *Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung: Studi Pada Partai Perindo dan Partai Berkarya*. dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

- Jamri. (2018). *Eksistensi Perempuan di Partai Lokal Kota Banda Aceh: Studi Kasus Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh*. dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Silam Negeri Ar-Raniry.
- Joni Lovenduski (2016). *The Supply and Demand Model of Candidate Selection: Some Reflection. Government and Opposition*.
- Krook, M. L., & Childs, S. (2010). *Women, Gender, and Politics: A Reader*. Oxford University Press.
- Kuncoro. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Labolo, Muhadam & Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cet 1
- Labolo, Muhadam & Teguh Ilham (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, M. (2016). *Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-kader DPD PAN Kabupaten Majene*. dalam *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol. 2 No. 1.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nisak, Misfaatin. (2022). *Rekrutmen Perempuan dalam Partai Politik (Studi Komparasi PDI Perjuangan dan PKB Kabupaten Demak*. dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
- Partanto, P. A., & Al Barry, M. D. (1994). *Kamus ilmiah populer*. dalam Surabaya: Arkola, Vol. 37 No. 23.
- Primasari, V. A. (2020). *Proses Rekrutmen Caleg Muda Partai Nasdem Di Kota Malang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Saputra, R. T. (2017). *Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009: Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara*. dalam Jurnal Universitas Mulawarman, Vol. 2 No. 1.

Sartori, Giovanni. (1976). *Parties and Party Systems: a Framework of Analysis*. New York: Cambridge University Press.

Sobari, Imam. Robby Darwis Nasution & khoirrurosyidin. (2018). *Kaderisasi Perempuan dalam Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Kabupaten Ponorogo*. dalam jurnal FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 3 No.2.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadinata, L. (2005). *Perempuan dan Politik: Identitas, Representasi, dan Kepemimpinan*. Gramedia Pustaka Utama.

Syamsudin. (2016). *Panduan rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta : LPI.

Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Wardani, S. B. E. (2014). *Perempuan dan Pemilu di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Wulandari, Indah Dwi. (2019). *Perempuan dan Partai Politik: Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya (golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yusuf, A. Muri (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Peraturan dan Undang-undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Wawancara Penelitian

1. Foto bersama Bapak Andrian Fernando, S.E (Sekretaris DPC Partai Demokrat)



2. Foto bersama Bapak Santiko, S.E (Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat)



3. Foto bersama Ibu Ayu Cahya Widianingrum, S.H (Ketua Srikandi DPC Partai Demokrat)



4. Foto bersama Ibu Novia Amalia (Sekretaris Srikandi DPC Partai Demokrat)



5. Foto bersama Ibu Mamik (Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang)



6. Foto bersama Ibu Nanik Sugianti (Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang)



7. Foto bersama Ibu Tri Indrayanti (Anggota Bidang Komunikasi Strategi Daerah)



8. Foto bersama Bapak Aris (Ketua KPU Kabupaten Kudus)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Aisya Dhefi Helmalia Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 31 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : JL. Parang Garuda Raya RT 07/RW 06 No. 27,
Kec. Bae, Kab. Kudus
Nomor Hp/WA : 087715765368
Email : aisyadhefi@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK PEMBINA	2007
2.	SDN 01 BAE	2015
3.	SMP 01 BAE	2018
4.	SMA N 01 BAE KUDUS	2021
5.	UIN WALISONGO SEMARANG	Sekarang

Pengalaman Organisasi :

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	UKM Fisip Entrepreneurship UIN Walisongo Semarang	Anggota	2021-2022
2.	Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS) Cabang UIN Walisongo Semarang	Pengurus Departemen Pendidikan	2022-2023
3.	SEMA FISIP UIN Walisongo Semarang	Tenaga Ahli Komisi 2	2022-2023

Semarang, 25 Februari 2025

Penulis

Aisya Dhefi Helmalia Putri